

SKRIPSI

ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN DPRD DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PASAMAN (STUDI KASUS APBD TAHUN ANGGARAN 2009)



OLEH :

RUSMAN ARIF
NIM. 10875002077

**PROGRAM S1
JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU**

2012

ABSTRAK

ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN DPRD DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PASAMAN (STUDI KASUS APBD TAHUN ANGGARAN 2009)

Oleh : Rusman Arif

Penelitian ini dilakukan di Dewan Permusyawaratan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasaman. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana pelaksanaan pengawasan DPRD Kabupaten Pasaman terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pengawasan pelaksanaan APBD di Kabupaten Pasaman. Demi mempermudah pelaksanaan penelitian ini, peneliti menetapkan populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota DPRD Kabupaten Pasaman dengan Sampel penelitian yang diambil dari perwakilan masing-masing fraksi dan juga Kepala SKPD yang dijadikan sebagai Key Informan. Setelah peneliti melakukan observasi dan wawancara di lapangan, maka diketahui pelaksanaan pengawasan DPRD Kabupaten Pasaman terhadap pelaksanaan APBD masih belum berjalan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang, adapun faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pengawasan oleh DPRD Kabupaten Pasaman terhadap pelaksanaan APBD meliputi ; banyaknya tugas dan tanggung jawab DPRD sehingga fungsi pengawasan tidak menjadi prioritas utama, keterbatasan fasilitas sehingga mempengaruhi kelancaran pengawasan, tidak sedikit anggota DPRD yang profesionalisme dan kecakapannya masih lemah, dan lain sebagainya.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbilalamin, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah memberikan rahmad dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam selalu dicurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah datang dengan islam dan Alqur'an sebagai pedoman bagi segenap insan yang senantiasa teguh pendiriannya dalam melaksanakan ajarannya.

Skripsi ini yang berjudul “ ***ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN DPRD DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PASAMAN (Studi kasus APBD Tahun Anggaran 2009)*** di tulis sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Tidak terasa empat tahun sudah penulis lewati hari hari di kampus Islami Madani Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, momentum demi momentum telah dilewati dengan segala rasa yang ada. Perjuangan yang sangat berat menempuh gelar Sarjana Administrasi Publik (S.AP) alhamdulillah telah dilewati dengan tegar dan penuh kesabaran. Tentu dalam mengarungi perjuangan ini, penulis tidak serta merta melakukannya secara individual, artinya ada orang orang yang berpengaruh dibalik kesiapan penulis melewati perjuangan ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membimbing selama berlangsungnya pembuatan skripsi, terutama penulis tujukan kepada :

1. Kedua orang tua penulis yang senantiasa mencurahkan kasih sayang dan untaian doanya demi kemajuan penulis, serta mendukung penuh dan memfasilitasi semua aktifitas perkuliahan
2. Bapak Rektor Prof. Dr. HM. Nazir karim, MA serta seluruh pejabat Rektorat UIN Suska Riau atas kesempatannya memberikan undangan kuliah kepada penulis melalui jalur masuk PBUD (Penelusuran Bibit Unggul Daerah)
3. Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Dr. Mahenmdra Romus, SP.M.Ec, bapak pembantu Dekan dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
4. Bapak Drs. Almasri selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara yang telah banyak membantu penulis, memberikan kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan kuliah ini hingga akhirnya menjadi seorang Sarjana.
5. Bapak Rusdi, S.Sos, MA selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Negara yang selalu setia menerima keluhan penulis dalam melewati rintangan perkuliahan ini,. Terimakasih banyak Pak, atas waktu dan perjuangan bapak demi membantu saya mengikuti ujian Munaqasyah.
6. Bapak Afrizl, S.Sos, M.Si selaku pembimbing skripsi penulis, ucapan terimakasih tak terhingga Pak untuk waktu dan pengorbanan bapak, disela sela kesibukan bapak masih menyempatkan membimbing skripsi penulis, terimakasih juga untuk kepedulian dan motivasi yang bapak berikan hingga penulis optimis menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

7. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Ekonomi, pegawai yang sangat baik, selalu memberikan kemudahan bagi penulis, Buk Yasniwati Selaku kabag TU yang rela membagikan waktunya mengajari penulis mengaji, Buk Nay Selaku Kasubbag Akadmik yang setia mendengar Curhatan penulis dan membantu proses akademik penulis, bg erik dan kak sry yang terus membantu apa yang penulis butuhkan terkait proses akademik.
8. Dosen dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang sangat baik hati, selalu peduli dengan akademik penulis, Buk Mustiqo, Buk Ikhwany Ratna, Pak Kamaruddin, Pak Purba dan semua dosen yang pernah membagikan ilmunya kepada penulis. Sungguh luar biasa ilmu yang penulis dapatkan, tidak hanya hubungan akademik tapi hubungan impersonal kita terjaga dengan baik.
9. Bapak Muslim, S.sos, M.Si selaku Penguji penulis yang memberikan pengarahan kepada penulis dan membagikan ilmunya demi memperkaya khazanah berfikir penulis.
10. Kawan seperjuangan Administrasi Negara Angkatan 2008. Terimakasih untuk warna kehidupan yang telah kalian berikan.

Terimakasih banyak atas semua pihak yang telah membantu, sungguh jika di uraikan satu persatu tak akan cukup lembaran ini untuk menuliskan semuanya. Terimakasih atas semua pihak baik yang disebutkan atau tidak, penulis hanya bisa berdoa dan memohon kepada Alah SWT agar semua perbuatan baik mereka menjadi amal shaleh dan mendapatkan ke Ridhoan Allah SWT. Amiinnn..

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang positif dan bersifat membangun agar skripsi ini lebih sempurna serta dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Karena penulis tahu bahwa “tak ada gading yang tak retak, tak ada lautan yang tak berombak” begitu juga dengan skripsi ini yang memiliki banyak kekurangan dan ke shilafan. Atas saran dan kritik membangunnya penulis ucapkan terimakasih.

Pekanbaru, 06 Juni 2012

Penulis

RUSMAN ARIF

10875002077

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI..... v

DAFTAR TABEL..... viii

BAB I

PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang.....	1
1.2.	Batasan Masalah.....	11
1.3.	Rumusan Masalah	11
1.4	Tujuan Penelitian	12
1.5	Manfaat Penelitian	12
1.6	Sistematika Penulisan	13

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1	Pengertian Pengawasan.....	15
2.2	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....	21
2.3.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).....	25
2.4.	Dasar Hukum Pengawasan DPRD.....	31
2.5.	Konsepsi Pengawasan DPRD	33
2.6	Indikator Pelaksanaan Fungsi Pengawasan terhadap APBD	40
2.7	Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah.....	42
2.8	Rencana Strategis Daerah	46
2.9	Defenisi Operasional.....	50
2.10	Konsep Operasional	51

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian.....	53
3.2 Lokasi Penelitian.....	54
3.3 Populasi dan Sampel	54
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	57
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	58
3.6 Teknik Analisis Data	59

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

5.1 Gambaran Umum Kabupaten Pasaman	60
5.2 Gambaran Umum DPRD Kabupaten Pasaman.....	62
1. Pimpinan.....	65
2. Badan Musyawarah	66
3. Komisi	68
4. Badan Legislasi Daerah	71
5. Badan Anggaran	73
6. Badan Kehormatan	75
7. Alat Kelengkapan Lainnya	76

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Pasaman terhadap Pelaksanaan APBD Kabupaten Pasaman Tahun 2009	77
5.2. Rekapitulasi Pembahasan Wawancara.....	104

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan	106
6.1.1 Pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan APBD oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman.....	106
6.1.2 Faktor Penghambat Pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman.....	107
6.2 Saran.....	108

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Populasi Dan Sampel Penelitian	55
Tabel 4.1.	Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Pasaman menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin.....	63
Tabel 4.2	Fraksi-Fraksi di DPRD Kabupaten Pasaman	64
Tabel 4.3	Pimpinan DPRD Kabupaten Pasaman	65
Tabel 4.4	Daftar Struktur Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Pasaman .	67
Tabel 4.5	Komisi dan Lingkupan Kerja DPRD Kabupaten Pasaman.....	68
Tabel 4.6	Daftar Susunan Personil Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Pasaman Periode 2009-2014.....	70
Tabel 4.7	Daftar Struktur Badan Legislasi Daerah DPRD Kabupaten Pasaman.....	72
Tabel 4. 8	Tabel Struktur Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pasaman	74
Tabel 4.9	Strukturur Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Pasaman	75

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak berakhirnya Orde Baru, Indonesia memasuki era baru yang ditandai dengan reformasi di berbagai bidang, yang tujuannya adalah mengembalikan kedaulatan kepada rakyat seutuhnya melalui proses demokrasi. Perkembangan demokrasi di Indonesia memperlihatkan adanya dorongan pada pemerintahan rakyat. Rakyat mempunyai kedaulatan yang tertinggi, dengan sistem politik yang demokratis sehingga seluruh kebijakan dan aturan yang mengikat rakyat dilaksanakan dengan persetujuan rakyat. Persetujuan melalui perwakilan memperlihatkan adanya pendelegasian kedaulatan rakyat kepada wakil wakilnya di parlemen yang dipilih melalui pemilu.

Pemilu yang merupakan ujung tombak demokrasi membutuhkan institusi yang menjadi pelaku pemilu. Institusi yang formal sebagai peserta pemilu adalah partai politik sebagai suatu pilar demokrasi yang merupakan tempat penyaluran aspirasi rakyat dan elit-elit partai politik sebagai representasi wakil rakyat untuk mewakili kepentingan rakyat di lembaga legislatif. Lewat lembaga perwakilan rakyat inilah aspirasi masyarakat ditampung dan dituangkan dalam berbagai kebijakan umum.

Dalam buku sistem pemerintahan demokrasi, Arbi Sanit (1982:91) menyatakan “lembaga perwakilan rakyat merupakan perangkat kenegaraan yang sangat penting disamping perangkat-perangkat kenegaraan yang lain, baik yang bersifat infra struktur maupun supra struktur politik. Setiap pemerintahan yang

menganut sistem demokrasi selalu didasari suatu ide bahwa warga negara seharusnya dilibatkan dalam setiap proses pengambilan keputusan politik”

Berbicara tentang pemerintahan daerah tidak terlepas dari dua unsur penting didalamnya, yaitu : (1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga pemerintahan daerah yang melaksanakan fungsi pemerintahan daerah sebagai mitra pemerintah daerah, dan (2) Lembaga eksekutif daerah (pemerintah daerah), yaitu Kepala Daerah beserta jajarannya. Wasistiono,S., dan Wiyoso, Y., (2009) mengemukakan bahwa kedudukan DPRD dalam sistem pemerintahan daerah sebagai bagian dari sistem pemerintahan negara mengalami perubahan yang sangat dinamis, seiring perubahan sistem desentralisasinya. Pada saat sistem pemerintahannya sangat sentralistik, maka kedudukan DPRD dibuat lemah. Sebaliknya, jika sistem pemerintahannya sangat desentralistik, maka kedudukan DPRD dibuat sangat kuat.

Dengan diberlakukannya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, terjadilah pelimpahan kekuasaan baik secara politik maupun secara administratif kepada daerah untuk menyelenggarakan kewenangan sesuai dengan prakarsa dan inisiatif masyarakat di daerah selain 6 (enam) kewenangan yang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat antara lain politik luar negeri, moneter dan fiskal nasional, agama, pertahanan, keamanan, dan yudisial. Pelimpahan kewenangan itulah yang kita namakan dengan otonomi daerah.

Pemberian otonomi daerah seluas-luasnya berarti pemberian kewenangan dan kekuasaan kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya

daerah secara optimal. Agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan, maka pemberian kewenangan dan kekuasaan yang luas tersebut harus diikuti dengan pengawasan yang kuat. Penguatan fungsi pengawasan ini dapat dilakukan salah satunya melalui optimalisasi fungsi dan peran DPRD sebagai kekuatan penyeimbang (*balance of power*) bagi eksekutif daerah (Mardiasmo, 2004).

Pelimpahan kewenangan yang besar itu secara otomatis juga memindahkan fokus politik ke daerah karena pusat kekuasaan tidak hanya dimonopoli oleh pemerintah pusat seperti di era sentralisasi namun telah terdistribusi ke daerah. Pelimpahan kewenangan itu disertai pula dengan pemberian kekuasaan yang lebih besar bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam menjalankan fungsi *Legislasi, Budgeting* dan *Controlling*. Karena diharapkan dengan Otonomi Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mampu meningkatkan peran pembuatan peraturan daerah yang sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat di daerah seperti halnya dengan Kabupaten Pasaman sebagai daerah otonom yang menyelenggarakan otonomi daerah berdasarkan asas desentralisasi yang secara ideal diharapkan dapat secara mandiri berkonsentrasi membangun daerahnya.

Sejalan dengan luasnya kewenangan pemerintah daerah yang tergambar di atas maka dua lembaga negara eksekutif dan legislatif sama-sama memiliki tanggungjawab konstitusional dan sejalan dengan itu pula tanggungjawab moralitas DPRD dituntut untuk melakukan fungsi *controlling* (pengawasan) yang melingkupi sektor wajib dan pilihan. Sehingga kehadiran DPRD dapat dirasakan jelas dalam setiap pembangunan yang melingkupi semua sektor tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah secara tegas dinyatakan bahwa DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Fungsi pengawasan merupakan salah satu fungsi terpenting DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengawasan merupakan salah satu fungsi utama yang melekat pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Melalui fungsi pengawasan ini DPRD menunjukkan bahwa dirinya sebagai wakil rakyat dengan memasukkan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang diwakilinya kedalam pasal-pasal undang-undang mengawasi perjalanan pelaksanaannya

Pengawasan DPRD bertujuan untuk menjamin agar pemerintah daerah menjalankan programnya sesuai dengan rencana dan ketentuan perundangan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, pasal 343 menyatakan bahwa pengawasan merupakan salah satu dari tiga fungsi DPRD. Fungsi ini diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pasal 42 ayat (1) point c menyatakan bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah.

Pengawasan semestinya merupakan salah satu fungsi yang paling intensif yang dapat dilakukan lembaga DPRD. Fungsi pengawasan yang dijalankan DPRD dalam konteks sebagai lembaga politik merupakan bentuk pengawasan politik yang lebih bersifat strategis dan bukan pengawasan teknis administrasi. Ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan yang diemban DPRD dalam tataran pengendalian kebijakan guna menciptakan check and balances. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD kepada eksekutif substansinya adalah mengarah pada pengawasan politik atau kebijakan. Sementara itu pengawasan administrasi dilakukan oleh lembaga yang dibentuk oleh negara/ pemerintah yakni Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Lembaga Pengawasan Fungsional lainnya (BPKP, Irjen pada Kementerian/Lembaga Non Departemen, Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) di Propinsi dan Kabupaten/Kota).

Salah satu bentuk pengawasannya adalah DPRD bertindak sebagai lembaga pengendali atau pengontrol yang dapat menyetujui atau bahkan menolak sama sekali ataupun menyetujui dengan perubahan-perubahan tertentu terhadap rancangan peraturan daerah yang akan ditetapkan menjadi Perda. Hal ini dapat dipahami bahwa sebenarnya lembaga DPRD itu adalah lembaga politik. Pertama-tama yang harus dipahami sebagai lembaga politik adalah sifatnya sebagai lembaga politik tercermin dalam fungsinya untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Perspektif sebagai lembaga politik, prasyarat pokok untuk menjadi anggota parlemen itu adalah kepercayaan rakyat, bukan prasyarat keahlian yang lebih bersifat teknis daripada politis. Meskipun seseorang bergelar Prof. Dr., jika yang bersangkutan tidak dipercaya oleh rakyat, ia tidak bisa menjadi anggota

DPRD. Sebaliknya, meskipun seseorang hanya tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), tetapi ia mendapat kepercayaan dari rakyat, maka yang bersangkutan “legitimate” untuk menjadi anggota DPRD (Priyono).

Namun demikian, fungsi pengawasan yang dijalankan oleh DPRD dinilai sebagian masyarakat belum optimal. Masyarakat mengkritik bahwa anggota DPRD dinilai tidak profesional. DPRD dianggap tidak profesional karena belum/tidak mampu mengoptimalkan fungsi pengawasan, sehingga penyerapan anggaran oleh eksekutif berjalan nyaris tanpa pengawasan yang berarti.

Pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD merupakan kunci utama dalam mengukur jalannya pembangunan suatu daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah instrument terpenting dalam penyelenggaraan pembangunan suatu daerah demi terselenggaranya pembangunan yang diharapkan sangat bergantung pada sejauhmana fungsi APBD sebagai tolak ukur pelaksanaan pembangunan dapat dijalankan. Artinya, salah satu ketergantungan dalam menjalankan fungsi APBD sebagai tolak ukur dapat dilihat dari sejauhmana pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaan APBD.

Sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi publik, bahwa semua elemen stakeholders pemerintah (eksekutif) sebagai pelaksana APBD, berhak melakukan pengawasan. Namun, sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa elemen yang memiliki legitimasi politik yang kuat yang posisinya sejajar dengan pemerintah (eksekutif) adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). DPRD-lah yang memiliki kewenangan dan kekuasaan lebih dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan APBD.

Pengawasan DPRD yang dimaksud tidak hanya sebatas seberapa sering agenda seremonial dan mekanisme pengawasan dilakukan. Tapi jauh dari itu, termasuk sejauhmana capaian substantif pelaksanaan APBD terwujud. Sejahterama prinsip efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan APBD serta sejauhmana upaya perbaikan dan tindaklanjut oleh DPRD terhadap pelaksanaan APBD. Bahwa semuanya sangat bergantung pada wujud pengawasan dan prosesnya yang dilakukan DPRD. Pengawasan tersebut juga melingkupi sejak APBD akan diparipurnakan hingga APBD di perdakan sampai pada tahap akhirnya pelaporan penggunaan oleh kepala daerah. Artinya, proses legitimasi yang terdapat di dalamnya, apakah sudah memenuhi kriteria hukum dan asas politik sebagaimana diatur dan diharapkan masyarakat. Ini penting, karena legitimasi yang dilakukan juga mempengaruhi tingkat pelaksanaan APBD. Semakin tepat waktu, regulasi dan penekanan politik dijalankan dalam pengesahan APBD tentu semakin tepat pula pelaksanaannya.

Kemudian banyak faktor yang mendasari untuk mengukur sejauhmana pengawasan itu sendiri dilakukan. Di antaranya, tingkat pemahaman DPRD yang disebut berfungsi sebagai controlling, pemahaman dan penguasaan regulasi yang mengatur tugas pengawasan, termasuk masalah wilayah wewenang DPRD untuk melakukan pengawasan. Pemahaman dan implementasi akan hak dan kewajiban DPRD. Pemahaman dan penguasaan akan system keuangan administrasi keuangan daerah. Kaitannya dengan era otonomi daerah yang tentunya telah banyak mengalami perubahan. Bagaimana melihat dan memposisikan APBD dengan baik dan benar, dan bentuk-bentuk ukuran lainnya

guna mengoptimalkan peran DPRD serta sinerginya dengan harapan rakyat dan juga bagaimana mekanisme yang dijalankan, keterlibatan pihak ketiga, hingga pada improvisasi DPRD dalam melakukan pengawasan. Semuanya akan menjadi deret ukur untuk melihat dan menyimpulkan komitmen DPRD dalam menjalankan tugas pengawasannya sejalan dengan tujuan yang dimaksud Undang-undang No.32 tahun 2004.

Sebagaimana diketahui, DPRD merupakan lembaga negara yang selalu dirujuk rakyat dalam menyampaikan sikap kritis terhadap berbagai kebijakan pemerintah dan aparaturinya. Ironisnya, lembaga DPRD pun tidak lepas dari sasaran kritik rakyat, karena dalam banyak hal dianggap masih mengecewakan rakyat. Dalam pandangan rakyat yang berpikiran kritis, DPRD dianggap belum berfungsi sebagai lembaga perwakilan rakyat yang sesungguhnya. Rakyat menilai produk keputusan, sikap, dan perilaku DPRD tidak mencerminkan keinginan rakyat yang benar benar bisa menyuarakan apa yang di inginkan rakyat. Dilihat dari segi tingkat kehadiran anggota dewan yang terus menurun di tiap masa persidangan menunjukan betapa rendahnya kredibilitas para politisi. Mereka yang telah dipilih oleh konstituennya tidak bisa menunjukan kinerja yang baik, minimal dilihat dari tingkat kepedulian mereka akan persoalan-persoalan di persidangan. Bahkan hadir saja tidak dilakukannya, apalagi berkontribusi dalam membahas materi di persidangan.

Bertolak dari wacana yang dilontaran masyarakat tersebut membuat penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Pasaman, karena dengan melihat kredibilitas para

anggota dewan akan jelas terlihat keberadaan dan kinerja dewan dalam menyuarkan aspirasi masyarakat, khususnya dalam mengalokasikan anggaran untuk kegiatan yang berpihak kepada rakyat, serta dengan adanya pengawasan yang jelas terhadap pemerintah bisa mengembalikan krisis kepercayaan masyarakat yang telah luntur akibat anggota DPRD yang kurang kontrol dalam melakukan tugas tugasnya sebagai wakil rakyat.

Berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas pemeriksaaan belanja daerah Kabupaten Pasaman tahun anggaran 2009 diketahui masih terdapat kelemahan dalam perencanaan, pelaksanaan prosedur dan penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan oleh pejabat/pegawai yang menyebabkan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran, antara lain kesalahan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk kontrak pengadaan jasa konsultan yang menyebabkan terdapat kelebihan pembayaran kepada rekanan, adanya kegiatan pengadaan yang seharusnya dilakukan dengan proses tender tetapi dilaksanakan dengan penunjukan langsung dan penetapan biaya langsung personil tidak dilengkapi dengan dokumen gaji dan bukti setor pajak tenaga ahli pada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta lemahnya pengawasan dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pengawas Lapangan atas kegiatan di masing-masing SKPD yang menyebabkan penyelesaian atas kegiatan tersebut mengalami keterlambatan.

Selain itu, BPK RI juga menghasilkan delapan temuan pada tahun anggaran 2009 sebesar Rp1.651.878.908,20. Temuan-temuan tersebut digolongkan dalam

masalah penyimpangan terhadap kriteria atau peraturan yang telah ditetapkan sebanyak tiga temuan, penyimpangan yang mengganggu asas kehematan sebanyak satu temuan, penyimpangan yang mengganggu asas efisiensi sebanyak dua temuan dan penyimpangan yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya program yang direncanakan sebanyak dua temuan. Penyimpangan dana terbesar itu ada pada tiga dinas yang mendapat sorotan yang paling banyak menggunakan penyimpangan APBD Kabupaten Pasaman, yaitu pada Dinas Pekerjaan Umum banyak proyek proyek yang berjalan tidak sesuai dengan Rancangan Anggaran Belanja sehingga merugikan pemerintah daerah sebesar Rp.28.466.250, kemudian pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan total kerugian pada APBD senilai Rp. 13.567.500, disamping itu Dinas Kesehatan juga memangkas APBD kabupaten Pasaman sebesar Rp.92.330.000 yang mana anggaran tersebut masih dipertanyakan arus penggunaannya. Jika kita terus merujuk kepada laporan pemeriksaan BPK RI atas Pelaksanaan APBD Kabupaten Pasaman banyak sekali dugaan penyimpangan yang ditemui oleh beberapa SKPD di Kabupaten Pasaman.

Dari persoalan ini kita dituntut berfikir tentang kinerja DPRD yang lemah dalam melakukan pengawasan karena bagaimana bisa DPRD meloloskan penggunaan anggaran yang besar ini hanya untuk kepentingan salah satu pihak saja. Maka dari itu, dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu menjawab berbagai anggapan miring tentang DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan tersebut. Penelitian ini ingin meneliti dan mengkaji apakah fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Pasaman telah dilakukan dengan efektif sesuai dengan standar menurut peraturan perundang-undangan dengan menuangkannya dalam skripsi

yang berjudul **“ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN DPRD DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PASAMAN (STUDI KASUS APBD TAHUN ANGGARAN 2009) “**

Dengan demikian dalam skripsi ini akan dititik beratkan pada kajian tentang salah satu fungsi pokok DPRD yaitu fungsi pengawasan, bahwa fungsi pengawasan dimaksud adalah pengawasan terhadap penggunaan anggaran dan pendapatan belanja daerah Kabupaten Pasaman tahun 2009. Alasan pemilihan tahun anggaran 2009 dikarenakan titik permasalahan penyimpangan aliran dana APBD Pasaman banyak terjadi pada tahun anggaran 2009 berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

1.2. Batasan Masalah

Banyaknya aspek pengawasan yang dilakukan oleh DPRD maka dalam penelitian ini penulis membatasi masalah pengawasan hanya pada pengawasan penggunaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman tahun anggaran 2009.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dan mengingat masalah merupakan inti dalam penyusunan sebuah skripsi dimana masalah akan diteliti serta mencari

solusinya, untuk memudahkan dalam menelaah fokus yang akan disorot, maka penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah fungsi pengawasan DPRD dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman tahun 2009 ?
2. Kendala kendala apakah yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD Kabupaten Pasaman ?

1.4 Tujuan Penelitian

Pada dasarnya setiap penulisan skripsi mempunyai tujuan yang hendak dicapai, demikian pula dengan penulisan ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman tahun anggaran 2009
2. Untuk mengetahui kendala kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD Kabupaten Pasaman

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk kepentingan pengembangan akademik dan kepentingan Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat.

1. **Manfaat Akademik**, yaitu sebagai bahan pengembangan Ilmu pengetahuan dibidang sosial politik khususnya Ilmu Administrasi Negara. Penulisan ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi yang akan melakukan penelitian dengan permasalahan yang sama sehingga hasil

penelitian ini dapat dijadikan perbandingan dan pedoman dalam penulisan skripsi.

2. **Manfaat Praktis**, penelitian ini ditujukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman dan DPRD Kabupaten Pasaman. Manfaat kepada Pemerintah Daerah dan DPRD, merupakan sumbangan pemikiran dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap Pemerintahan Daerah

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan penelitian ini secara keseluruhan yang mana terdiri atas enam bab dan sub bab lain, meliputi;

BAB I PENDAHULUAN

Adapun yang terdapat dalam pendahuluan adalah latar belakang masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisa data sistematika penulisan.

BAB II TELAAH PUSTAKA

Dalam Telaah Pustaka ini berisikan tentang landasan teori yang menyangkut referensi-referensi dan buku-buku dengan permasalahan yang akan di bahas oleh peneliti.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam metode penelitian ini berisikan tentang Jenis Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Populasi dan Sampel, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data dan Analisa.

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini peneliti menggambarkan secara umum tentang tempat penelitian di mana peneliti melakukan penelitian. Dalam bab ini juga akan membahas dan merincikan keadaan umum tentang DPRD Kabupaten Pasaman

BAB V HASIL PENELITIAN

Dalam BAB V hasil penelitian ini, peneliti menjelaskan tentang hasil penelitian yang dilakukan dan disusun sedemikian rupa sehingga dapat diketahui maksud dan tujuan dari penelitian ini.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisi dua sub bab yaitu kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Pengertian Pengawasan

Terry dalam Salindeho (1995:25) mengemukakan bahwa Pengawasan berarti mendeterminasikan apa yang dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana-rencana. Jadi pengawasan dapat dianggap sebagai aktivitas untuk menemukan dan mengoreksi penyimpangan-penyimpangan penting dalam hasil yang dicapai dari aktivitas-aktivitas yang direncanakan.

Selanjutnya Fayol dalam Harahap (2001:10) mengemukakan bahwa pengawasan adalah upaya memeriksa apakah semua terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, perintah yang dikeluarkan, dan prinsip yang dianut. Juga dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dihindari kejadiannya di kemudian hari.

Pengawasan adalah salah satu fungsi organik manajemen, yang merupakan proses kegiatan pimpinan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan sasaran serta tugas-tugas organisasi akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana, kebijakan, instruksi, dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan yang berlaku. (LAN RI, 1997:159)

Lebih luas lagi pengertian pengawasan dikemukakan Situmorang dan Jusuf (1993:19) mengemukakan :

Dikalangan ahli atau sarjana telah disamakan pengertian controlling ini dengan pengawasan. Jadi pengawasan adalah termasuk pengendalian. Pengendalian berasal dari kata “kendali”, sehingga pengendalian mengandung arti mengarahkan, memperbaiki kegiatan yang salah arah dan meluruskannya menuju arah yang benar. Kenyataan dalam praktek sehari-hari bahwa istilah controlling itu sama dengan istilah pengawasan dan istilah pengawasan inipun telah mengandung pengertian luas, yakni tidak hanya sifat melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi tadi tetapi juga mengandung pengendalian dalam arti menggerakkan, memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan.

Berdasarkan deskripsi pengertian yang tersaji diperoleh suatu konsep pemahaman bahwa pengawasan (controlling) dapat dianggap sebagai aktivitas untuk menemukan, mengoreksi penyimpangan penting dalam hasil yang dicapai dari aktivitas yang direncanakan. Pengawasan bertujuan untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta pelaksanaan tugas-tugas organisasi.

LAN RI (1997:159), mengemukakan bahwa hasil pengawasan harus dijadikan masukan oleh pimpinan dalam pengambilan keputusan yaitu untuk :

- a. Menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan dan ketidaktertiban.
- b. Mencegah terulangnya kembali kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan dan ketidaktertiban tersebut.
- c. Mencari cara-cara yang lebih baik atau membina yang telah baik untuk mencapai tujuan dan melaksanakan tugas-tugas organisasi.

Dengan demikian fungsi pengawasan adalah untuk mencegah sekecil dan sedini mungkin terjadinya suatu penyimpangan dalam pelaksanaan suatu

pekerjaan atau tugas. Persoalannya tanpa pengawasan, proses pelaksanaan suatu pekerjaan atau tugas bisa saja menyimpang atau bertentangan dari prosedur dan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atau yang telah berjalan haruslah efektif. Penyimpangan atau kesalahan dapat diminimalisir sehingga kegiatan dalam suatu institusi dalam berjalan dengan lancar dan terkendali.

Agar pengawasan berjalan efektif, maka seorang manajer atau pimpinan instansi haruslah mengetahui ciri-ciri pengawasan yang efektif tersebut. Menurut Siagian (2004: 130) pengawasan akan berlangsung efektif apabila memiliki berbagai ciri yang dibahas sebagai berikut :

- a. Pengawasan harus merefleksikan sifat dari berbagai kegiatan yang diselenggarakan. Yang dimaksud ialah bahwa teknik pengawasan harus sesuai, antara lain dengan penemuan informasi tentang siapa yang melakukan pengawasan dan kegiatan apa yang menjadi sasaran pengawasan tersebut.
- b. Pengawasan harus segera memberikan petunjuk tentang kemungkinan adanya deviasi dari rencana.
- c. Pengawasan harus menunjukkan pengecualian pada titik-titik strategis tertentu.
- d. Objektivitas dalam melakukan pengawasan. Standar harus jelas terlihat bukan saja dalam prosedur dan mekanisme kerja, melainkan rangkaian kriteria yang menggambarkan persyaratan baik kuantitatif dan kualitatif.

Dengan adanya kriteria tersebut, pengawasan dapat dilakukan lebih objektif. Selain itu, Sondang P Siagian juga menyatakan bahwa dalam pengawasan dikenal juga adanya tipe tipe pengawasan. Pada dasarnya ada beberapa jenis pengawasan yang dapat dilakukan, yaitu:

a. Pengawasan Intern dan Ekstern

Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan.”. Sedangkan pengawasan ekstern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi.

b. Pengawasan Preventif dan Represif

Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Selanjutnya Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan.

c. Pengawasan Aktif dan Pasif

Pengawasan dekat (aktif) yaitu pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan. Hal ini berbeda dengan pengawasan jauh (pasif) yang melakukan pengawasan melalui penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggung jawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran

- d. Pengawasan kebenaran formil menurut hak (*rechtmaticheid*) dan pemeriksaan kebenaran materiil mengenai maksud tujuan pengeluaran (*doelmatigheid*).

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara, pengawasan ditujukan untuk menghindari terjadinya “korupsi, penyelewengan, dan pemborosan anggaran negara yang tertuju pada aparaturnya atau pegawai negeri.

Menurut Silalahi (2002: 396) langkah-langkah dalam pengawasan adalah sebagai berikut:

- a. Tetapkan standar

Standar adalah kriteria dari hasil yang diinginkan dalam melaksanakan kegiatan. Menetapkan suatu standar akan memberikan suatu nilai atau petunjuk yang menjadi ukuran sehingga hasil-hasil yang nyata dapat dibandingkan.

- b. Monitor dan Ukur Kinerja

Agar pelaksanaan pengukuran kinerja berlangsung dengan tepat, maka perlu dikumpulkan data dan mendeteksi permasalahan. Untuk mengumpulkan data tentang kinerja dapat dilakukan dengan metode observasi, wawancara atau angket, pengamatan atas laporan, baik laporan lisan maupun laporan tertulis. Jika data atau informasi sudah dikumpulkan melalui individu, kelompok atau unit kerja yang dikontrol, harus diuji sebab ada kemungkinan karyawan akan memberikan data palsu dapat dihindarkan.

c. Bandingkan Hasil Aktual dengan Standar

Tahap ketiga dalam proses pengawasan ini ialah membandingkan hasil kinerja aktual dengan standar. Untuk itu dibutuhkan standar yang jelas dan pasti yang digunakan sebagai ukuran yang diperbandingkan.

d. Ambil Tindakan Perbaikan

Tindakan korektif atau penyesuaian biasanya mengambil tindakan perbaikan atau penyesuaian hingga mengubah standar yang digunakan.

Secara filosofis dikatakan bahwa pengawasan sangat penting karena manusia pada dasarnya mempunyai sifat salah atau khilaf, sehingga manusia dalam organisasi perlu diawasi, bukan untuk mencari kesalahannya kemudian menghukumnya tetapi untuk mendidik dan membimbingnya. Husnaini (2001:400) menyatakan bahwa tujuan pengawasan adalah sebagai berikut:

- a. Menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, dan hambatan
- b. Mencegah terulang kembalinya kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan.
- c. Meningkatkan kelancaran operasi perusahaan
- d. Meningkatkan kinerja perusahaan.

Suatu organisasi akan berjalan terus dan semakin kompleks dari waktu ke waktu, banyaknya orang yang berbuat kesalahan dan guna mengevaluasi atas hasil kegiatan yang telah dilakukan, inilah yang membuat fungsi pengawasan semakin penting dalam setiap organisasi. Tanpa adanya pengawasan yang baik tentunya

akan menghasilkan tujuan yang kurang memuaskan, baik bagi organisasinya itu sendiri maupun bagi para pekerjanya.

2.2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dalam suasana reformasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengalami amandemen sebanyak empat kali (tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002) dan khusus menyangkut pasal 18 tentang Pemerintah daerah mengalami perubahan dan penambahan isi yang cukup signifikan.

Sesuai dengan kondisi politik saat ini maka rumusan tentang kedudukan DPRD dalam UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengalami perubahan mendasar. Hal itu terlihat dalam rumusan tentang pemerintahan daerah. Dalam rumusan pasal 3 ayat (1) UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan:

”Pemerintahan Daerah adalah:

- a. Pemerintahan daerah provinsi yang terdiri atas Pemerintah Daerah provinsi dan DPRD provinsi;
- b. Pemerintahan Kabupaten/Kota yang terdiri atas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan DPRD Kabupaten/Kota.”

Lebih jauh dalam pasal 40 UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dirumuskan:”DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah”.

1. Pimpinan DPRD

Sesuai isi pasal 57 UU nomor 22 tahun 2003 disebutkan Pimpinan DPRD Provinsi terdiri dari seorang Ketua dan sebanyak-banyaknya tiga orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota DPRD Provinsi dalam sidang paripurna DPRD provinsi. Sedangkan untuk DPRD kabupaten/kota adalah seorang Ketua dan dua orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DPRD kabupaten/kota dalam sidang paripurna DPRD kabupaten/kota (pasal 73 ayat (1)).

Pimpinan DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Tinggi untuk Pimpinan DPRD provinsi dan Ketua Pengadilan Negeri untuk Pimpinan DPRD kabupaten/kota.

2. Kedudukan dan Fungsi DPRD

Kedudukan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan pasal 76 UU nomor 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Sedangkan fungsi dari DPRD adalah:

- a. Legislasi
- b. Anggaran
- c. Pengawasan

Ternyata fungsi DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota diseragamkan. Hal ini dirinci lagi dalam penjelasan pasal 61 dan pasal 77 UU nomor 22 tahun 2003. Yang dimaksud dengan fungsi legislasi adalah legislasi

daerah yang merupakan fungsi DPRD untuk membentuk peraturan daerah bersama Kepala Daerah. Adapun yang dimaksud dengan fungsi anggaran adalah fungsi DPRD bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk menyusun dan menetapkan APBD yang didalamnya termasuk anggaran untuk pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD. Penjelasan mengenai fungsi pengawasan adalah fungsi DPRD untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, peraturan daerah, APBD dan Keputusan Kepala daerah serta kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

3. Tugas Dan Wewenang DPRD

Tugas dan wewenang DPRD sesuai dengan isi pasal 42, Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah:

- a) Membentuk Peraturan Daerah (Perda) yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama.
- b) Membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah.
- c) Melaksanakan pengawasan terhadap Perda dan Peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerja sama internasional di daerah
- d) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi

DPRD provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD Kabupaten/Kota.

- e) Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah.
- f) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah
- g) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
- h) Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- i) Membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah
- j) Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah
- k) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

Disebutkan juga bahwa selain tugas dan wewenang seperti diatas DPRD mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam undang-undang lainnya.

4. Hak Dan Kewajiban DPRD

Dalam pasal 43 UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa DPRD mempunyai hak interpelasi, hak angket serta hak menyatakan pendapat.

Yang dimaksud dengan hak interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Kepala Daerah mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara.

Adapun yang dimaksud dengan hak angket adalah pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan tertentu kepala daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara. Pelaksanaan hak angket dilakukan setelah hak interpelasi dan mendapatkan persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota yang hadir.

Terakhir tentang hak menyatakan pendapat adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan kepala daerah atau sebagai lembaga mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

2.3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 1 butir 8 tentang Keuangan Negara).

Anggaran merupakan suatu pernyataan formal yang dibuat oleh manajemen berupa rencana-rencana yang akan dilakukan pada masa yang akan datang dalam suatu periode tertentu, dimana rencana tersebut merupakan suatu pedoman dalam pelaksanaan kegiatan selama periode tersebut (Robinson, 2006)

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, fungsi APBN/ APBD terdiri dari :

1. Fungsi Otorisasi, anggaran daerah merupakan dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi Perencanaan, anggaran daerah merupakan pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan
3. Fungsi Pengawasan, anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
4. Fungsi Alokasi, anggaran daerah diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Fungsi Distribusi, anggaran daerah harus mengandung arti/ memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi Stabilisasi, anggaran daerah harus mengandung arti/ harus menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

Secara umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah pernyataan tentang rencana pendapatan dan belanja daerah dalam periode tertentu (1 tahun). Pada awalnya fungsi APBD adalah sebagai pedoman pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah untuk satu periode. Sebelum anggaran dijalankan harus mendapat persetujuan dari DPRD sebagai wakil rakyat maka fungsi anggaran juga sebagai alat pengawasan dan pertanggungjawaban terhadap kebijakan publik. Dengan melihat fungsi anggaran tersebut maka seharusnya anggaran merupakan *power relation* antara eksekutif, legislatif dan rakyat itu sendiri (Sopannah, 2004).

APBD mempunyai beberapa fungsi yang dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai fungsi kebijakan fiskal dan sebagai fungsi manajemen. Sebagai fungsi kebijakan fiskal, anggaran dapat digunakan untuk: (1) mengatur alokasi belanja untuk pengadaan barang-barang dan jasa-jasa publik; (2) alat distribusi yang bertujuan untuk menciptakan pemerataan atau mengurangi kesenjangan dalam masyarakat; dan (3) sebagai fungsi stabilisasi, misalnya jika terjadi ketidak seimbangan yang ekstrem maka pemerintah dapat melakukan intervensi melalui anggaran untuk mengembalikan pada keadaan normal. Sedangkan sebagai fungsi manajemen, APBD berfungsi untuk: (1) memberi pedoman bagi pemerintah untuk melakukan tugas-tugasnya pada periode mendatang; (2) Anggaran sebagai kontrol masyarakat terhadap kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah; dan (3) untuk menilai seberapa jauh pencapaian pemerintah dalam melaksanakan kebijakan dan program-program yang direncanakan. (Juli panglima saragih:2003)

Selain fungsi teknis diatas, dalam perspektif lain APBD berfungsi sebagai instrumen demokrasi ekonomi dan keadilan karena sebagai:

1. Penerjemahan kebijakan politik.
2. Keputusan politik untuk memutuskan kemana uang APBD dibelanjakan dan darimana saja dikumpulkan.
3. Sebagai bentuk jaminan sosial dan kesejahteraan masyarakat

Mardiasmo menyatakan Proses penyusunan APBD dapat dilihat dalam dua proses, yakni proses yang terjadi di eksekutif dan proses yang terjadi di legislatif

1. Proses yang terjadi di eksekutif

Proses penyusunan APBD secara keseluruhan beradaditangan sekretaris daerah yang bertanggung jawab mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyusunan APBD. Sedangkan proses penyusunan belanja rutin disusun oleh bagian keuangan Pemerintah Daerah, proses penyusunan penerimaan dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dan proses penyusunan belanja pembangunan disusun oleh Bappeda (bagian penyusunan program dan bagian keuangan).

2. Proses di legislatif

Di DPRD, proses penyusunan APBD dilakukan berdasarkan tata tertib DPRD. Adapun alur penyusunan APBD ditingkat Dewan adalah sebagai berikut:

- a. Setiap tahun menjelang berlakunya tahun anggaran baru, kepala daerah wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan lampiran selengkapnya dengan nota keuangan kepada DPRD.

- b. Pimpinan DPRD menyerahkan nota keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada Panitia Anggaran untuk memperoleh pendapatnya.
- c. Pendapat panitia anggaran diserahkan ke komisi-komisi sebagai bahan pembahasan.
- d. Setelah dari komisi-komisi diputuskan secara bersama antara DPRD dengan eksekutif dalam Rapat Paripurna.

Dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan proses sebagai berikut:

- a. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Perda yang berasal dari Walikota/Bupati/Gubernur disampaikan kepada DPRD melalui nota pengantar Walikota/Bupati/Gubernur. Sedangkan Raperda yang berasal dari usulan DPRD beserta penjelasannya disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD. Kedua rancangan tersebut disampaikan kepada anggota DPRD sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
- b. Tahap pembahasan Raperda, pembahasan Raperda dilakukan melalui 4 tahap kecuali apabila panitia musyawarah menentukan lain.

Pembahasan tahap I meliputi:

- 1. Penjelasan Walikota/Bupati/Gubernur dalam rapat Paripurna DPRD jika Raperda merupakan prakarsa dari Walikota/Bupati/Gubernur.
- 2. Penjelasan DPRD jika Raperda merupakan usul DPRD.

Pembahasan tahap II meliputi:

1. Dalam hal Raperda Walikota/Bupati/Gubernur:
 - a. Pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna
 - b. Jawaban Walikota/Bupati/Gubernur dalam rapat paripurna terhadap pandangan umum.
2. Dalam hal Raperda dari DPRD:
 - a. Pendapat Walikota/Bupati/Gubernur dalam rapat Paripurna terhadap Raperda.
 - b. Jawaban DPRD melalui pimpinan dalam rapat paripurna terhadap pendapat Walikota/Bupati/Gubernur

Pembahasan tahap III meliputi:

1. Pembahasan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi atau rapat panitia khusus yang dilakukan bersama-sama dengan pejabat yang ditunjuk Walikota/Bupati/Gubernur.
2. Laporan hasil pembahasan oleh komisi atau Pansus kepada pimpinan DPRD dan rapat paripurna khusus DPRD.

Pembahasan tahap IV meliputi:

1. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurnan DPRD yang didahului dengan:
 - a. Pendapat akhir fraksi-fraksi
 - b. Kesimpulan rapat oleh Pimpinan rapat.
2. Pemberian kesempatan kepada Walikota/Bupati/Gubernur untuk memberikan sambutan.

2.4. Dasar Hukum Pengawasan DPRD

Dalam konteks pengelolaan keuangan, pengawasan terhadap anggaran dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 yang menyatakan bahwa DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD. Pengawasan tersebut bukan berarti pemeriksaan, tapi lebih mengarah pada pengawasan untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam APBD. Hal ini sesuai juga dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 Pasal 92 yang menyatakan bahwa untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, DPRD melakukan pengawasan atas pelaksanaan APBD. Ini berarti bahwa pengawasan yang dilakukan oleh DPRD merupakan Pengawasan Eksternal dan ditekankan pada pencapaian sasaran APBD.

Pengawasan merupakan tahap integral dengan keseluruhan tahap pada penyusunan dan pelaporan APBD. Pengawasan diperlukan pada setiap tahap bukan hanya pada tahap evaluasi saja (Mardiasmo, 2001). Pengawasan yang dilakukan oleh dewan dimulai pada saat Penyusunan APBD, Pelaksanaan APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban APBD (Modjo, 2007). Pengawasan terhadap APBD penting dilakukan untuk memastikan alokasi anggaran sesuai dengan prioritas daerah dan diajukan untuk kesejahteraan masyarakat, dan menjaga agar Penggunaan APBD ekonomis, efisien dan efektif serta menjaga agar Pelaksanaan APBD benar-benar dapat dipertanggungjawabkan atau dengan kata lain bahwa anggaran telah dikelola secara transparan dan akuntabel untuk meminimalkan terjadinya kebocoran (Alamsyah, 1997).

Pengawasan ini bertujuan untuk mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, serta mengembangkan mekanisme *checks and balances* antara lembaga legislatif dan eksekutif demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Untuk menunjang terselenggaranya fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintahan daerah, dalam Pasal 43 undang-undang nomor 32 Tahun 2004 beserta penjelasannya memberikan hak-hak kepada DPRD diantaranya :

1. Hak Interpelasi, yaitu hak DPRD Provinsi untuk meminta keterangan kepada Bupati mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, Daerah dan Negara.
2. Hak Angket, yaitu hak DPRD Provinsi untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Bupati yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, Daerah dan Negara yang diduga bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan.
3. Hak menyatakan pendapat, yaitu hak DPRD Provinsi sebagai lembaga untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Bupati yang mengenai kewajiban luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpletasi dan hak angket.

2.5. Konsep Pengawasan DPRD

Konsep Pengawasan DPRD meliputi pemahaman tentang makna dan arti penting pengawasan, ruang lingkup dan proses pengawasan. Arti Penting Pengawasan DPRD disini merupakan salah satu unsur dari manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan (*Planning, Organizing, Actuating dan Controlling / POAC*). Fungsi pengawasan menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta memastikan tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Fungsi pengawasan ini mengandung makna penting, baik bagi pemerintah daerah maupun pelaksana pengawasan. Bagi pemerintah daerah, fungsi pengawasan merupakan suatu mekanisme peringatan dini (*early warning system*), untuk mengawal pelaksanaan aktivitas mencapai tujuan dan sasaran. Sedangkan bagi pelaksana pengawasan, fungsi pengawasan ini merupakan tugas mulia untuk memberikan telaahan dan saran, berupa tindakan perbaikan (Kartiwa, A., 2006).

Pengawasan memiliki arti penting bagi pemerintah daerah, karena akan memberi umpan balik untuk perbaikan pengelolaan pembangunan, sehingga tidak keluar dari jalur/tahapan dan tujuan yang telah ditetapkan. Sementara bagi pelaksana, pengawasan merupakan aktivitas untuk memberikan kontribusi dalam proses pembangunan agar aktivitas pengelolaan dapat mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien. (Sunarso : 2005)

Menurut Soegijanto dan Hoesada Pengawasan yang dilakukan DPRD bertujuan untuk memelihara akuntabilitas publik, terutama lembaga-lembaga yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintahan

serta pembangunan di daerah. Sistem akuntabilitas di daerah akan menjadi lebih efektif, karena proses dan hasil pengawasan yang dilakukan DPRD akan memungkinkan lembaga-lembaga publik digugat jika mereka tidak memenuhi kaidah-kaidah publik. Secara spesifik, hasil pengawasan DPRD terhadap Pemerintah Daerah ditujukan:

- a. Untuk menjamin agar Pemerintah Daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Untuk menjamin kemungkinan tindakan koreksi yang cepat dan tepat terhadap penyimpangan dan penyelewengan yang ditemukan dalam upaya mencegah berlanjutnya kesalahan dan atau penyimpangan.
- c. Untuk menumbuhkan motivasi, memperbaiki, mengurangi dan atau meniadakan penyimpangan.
- d. Untuk meyakinkan bahwa kinerja pemerintah daerah sedang atau telah mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Melalui pengawasan tersebut, DPRD dapat membangun sebuah *early warning system* atau *sistem penanda bahaya* apabila terjadi kejanggalan atau penyimpangan dalam proses pengelolaan tata pemerintahan daerah sedangkan ruang lingkup pengawasan DPRD Sebagai salah satu lembaga publik paling penting di daerah, segala aktivitas DPRD harus terlaksana secara sistimatis dan terencana termasuk pelaksanaan fungsi dan tugas pengawasan. Bentuk pengawasan DPRD dapat dilihat dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c yaitu

melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah.

Untuk melaksanakan suatu pelaksanaan yang sistimatis, langkah-langkah utamanya harus jelas dan logis, tanpa langka kerja yang sistimatis dan terencana DPRD akan sulit melaksanakan fungsi pengawasannya. Secara umum ada 4 (empat) langka utama pengawasan yang dapat dilakukan DPRD. 4 (empat) langka tersebut dijelaskan oleh I Ketut Putra Erawan Dkk (2004 : 18) sebagai berikut :

1 Pengawasan Politik Kebijakan

Pengawasan pada lingkup politik kebijakan mencakup 2 (dua) hal. *Pertama* pengawasan DPRD diarahkan untuk menilai penerapan keefektivan berbagai peraturan perundang-undangan serta kebijakan operasional pokok baik dalam bidang pemerintahan maupun pembangunan. *Kedua* pengawasan internal juga perlu dilakukan agar Raperda yang sedang dibahas tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau perda lainnya

2. Pengawasan Program Pemerintahan dan Pembangunan

Pengawasan pada tingkat ini dilakukan jika pelaksanaan program tertentu dinilai bertentangan dengan kebijakan daerah atau nasional. Dengan pengawasan ini, DPRD dapat merumuskan rekomendasi kebijakan apakah program pemerintahan dan pembangunan itu dapat dilanjutkan, diperbaiki atau dilanjutkan.

3. Pengawasan Proyek Strategis atau Vital

Lingkup pengawasan pada tingkat proyek mencakup proyek yang bermasalah atau bertentangan dengan standar atau kebijakan daerah dan nasional.

4. Pengawasan Kasus-kasus Penting dan Strategis

Justifikasinya adalah kelompok masyarakat tertentu mengalami dampak negatif atau mungkin membahayakan. Pengawasan ini dilakukan dengan adanya keluhan atau protes dari public (masyarakat)

Langkah awal yang harus ditempuh dalam melakukan pengawasan adalah menentukan agenda pengawasan. Agenda Pengawasan ini merupakan kerangka peran DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Agenda pengawasan sekurang-kurangnya berisi tentang penetapan dan kesepakatan hal-hal sebagai berikut :

- a. Apa obyek yang diawasi (*dengan skala prioritas*)
- b. Pada tingkat apa pengawasan dilakukan (kebijakan, program, proyek atau kasus tertentu)
- c. Komisi atau Anggota yang akan terlibat dalam rangkaian pengawasan
- d. Kapan pengawasan akan dilakukan

Langkah kedua yaitu Proses penentuan metodologi pengawasan merupakan proses menyusun dan menetapkan teknik dan prosedur pengawasan baku untuk setiap kegiatan pengawasan. Penentuan metodologi ini dimaksudkan memberikan pedoman atau pegangan kepada anggota maupun alat kelengkapan

DPRD dalam melaksanakan pengawasan. Sistem dan prosedur pengawasan DPRD tersebut, setidaknya meliputi :

- a. Penentuan jangka waktu pengawasan
- b. Teknik/cara pengawasan yang akan diterapkan
- c. Pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota
- d. Instansi terkait yang perlu dilibatkan (*jika diperlukan*)
- e. Bantuan tenaga ahli yang digunakan (*jika diperlukan*)
- f. Cara Pendokumentasian proses dan hasil pengawasan

Setelah menetapkan agenda pengawasan, langkah ketiga yaitu DPRD menetapkan dan mempersiapkan lembaga yang terkait dengan fungsi pengawasan, baik yang terkait langsung maupun tidak langsung. Setidaknya terdapat 2 (dua) alasan mendasar perlunya dibangun jaringan kerjasama pengawasan yaitu:

- a. Sebagai wakil rakyat dan unsur penyelenggara pemerintahan daerah DPRD harus dapat menjalankan fungsi pengawasan dan mempertanggungjawabkannya kepada rakyat (prinsip akuntabilitas publik)
- b. Dengan pertimbangan luasnya ruang lingkup pengawasan meliputi seluruh aktivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka tidak mungkin DPRD mampu melaksanakan pengawasan sendiri. Jaringan kerjasama pengawasan mencakup seluruh *stakeholders* pengawasan dalam arti luas, tingkat pusat, propinsi, kabupaten/kota, kecamatan hingga kelurahan. Di samping itu, mencakup institusi publik dan non-publik, formal dan informal. Jika Jaringan kerjasama pengawasan ini

dilakukan secara efektif akan memberikan manfaat tidak saja terbatas pada kepentingan daerah, melainkan juga kepentingan nasional yang lebih luas.

Secara rutin, pelaksanaan pengawasan DPRD dapat dilaksanakan dengan melakukan Monitoring dan Pengawasan Triwulan. Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan secara formal maupun secara informal. Metode formal dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Rapat koordinasi dan rapat evaluasi, dilakukan dengan masing-masing lembaga pemerintah daerah, melalui pemandangan umum fraksi-fraksi dalam rapat paripurna DPRD,
2. Rapat pembahasan, dalam sidang komisi, Rapat pembahasan dalam panitia-panitia yang dibentuk berdasarkan tata tertib DPRD,
3. Rapat dengar pendapat, dengan Pemerintah Daerah dan pihak-pihak lain yang diperlukan, dan
4. Kunjungan kerja, ke masyarakat dan instansi pemerintah daerah.

Dalam melaksanakan Pengawasan DPRD, DPRD juga berwenang untuk:

1. Mengundang pejabat-pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah untuk diminta keterangan, pendapat dan saran
2. Menerima, meminta dan mengusahakan untuk memperoleh keterangan dari pejabat/pihak-pihak terkait
3. Meminta kepada pihak-pihak tertentu melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan

4. Memberikan saran mengenai langkah-langkah preventif dan represif kepada pejabat yang berwenang.

Tahapan kelima dalam proses fungsi pengawasan yaitu Pelaporan. Pelaporan merupakan keluaran (*output*) dari pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh DPRD. Kualitas laporan yang dihasilkan oleh DPRD hendaknya dapat mencapai tujuan pengawasan itu sendiri, yaitu :

- a. Laporan DPRD dapat memberikan arah kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- b. Laporan DPRD bermanfaat dalam memberikan motivasi terhadap Pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan dan tindakan koreksi atas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- c. Laporan DPRD menghasilkan sistem peringatan dini (*early warning system*) bagi manajemen pemerintahan daerah yang memberitahukan manajemen pemerintahan daerah bahwa telah terjadi penyimpangan pelaksanaan program.
- d. Laporan DPRD dapat memberikan keyakinan tentang akuntabilitas publik pemerintah daerah kepada masyarakat bahwa tujuan pembangunan sudah berhasil atau belum berhasil mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan masyarakat.

Laporan Hasil Pengawasan DPRD baru dapat dikatakan memberikan suatu hasil yang bermanfaat, jika laporan hasil pengawasan tersebut ditindaklanjuti. Pelaksanaan tindak lanjut ini seharusnya juga dilakukan secara berkala, seiring dengan pelaksanaan pengawasan melalui aktivitas monitoring dan pengawasan

triwulanan. Hasil triwulan satu, harus dimonitor pada pelaksanaan pengawasan pada triwulan ke dua melalui rapat dengar pendapat dengan satuan kerja terkait atau peninjauan lapangan jika tindak lanjut tersebut harus dilakukan konfirmasi dan pengecekan di lapangan. Pelaksanaan tindak lanjut ini, harus didukung dengan mekanisme serta sarana administrasi yang memadai dan terstruktur, mulai dari hasil pengawasan sampai dengan selesainya pelaksanaan tindak lanjut.

Pada setiap akhir tahun anggaran dan pada akhir masa jabatannya, kepala Daerah diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ). LKPJ merupakan laporan yang disampaikan oleh kepala daerah setiap tahun dalam sidang Paripurna DPRD yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas otonomi. Pada saat tersebut, DPRD harus memberikan penilaian terhadap kinerja Kepala Daerah dalam melaksanakan pembangunan yang telah diamanahkan.

2.6 Indikator Pelaksanaan Fungsi Pengawasan terhadap APBD

Salah satu fungsi dewan yang sentral menjadi perhatian dan pembicaraan semua kalangan adalah fungsi pengawasan. Dalam ilmu administrasi fungsi pengawasan mengandung tindakan lembaga yang bersifat preventif dan preventif yang mengandung makna mengevaluasi dan mengawasi program-program pemerintah daerah. Oleh karena mengandung makna mengevaluasi, konsekwensinya adalah semua kebijakan pemerintah daerah dalam menjalankan program-programnya tidak serta merta termentahkan oleh karena sebuah pengawasan. Dalam melakukan fungsi pengawasannya terhadap penggunaan

anggaran pendapatan belanja daerah, DPRD Kabupaten Pasaman memiliki indikator penilaian yang telah di tentukan oleh hukum dan undang undang yang berlaku, yakni bersumber dari undang-undang No. 27 tahun 2004 yaitu

1. Perencanaan Pengawasan yang menyangkut seluruh proses penyusunan, pembahasan, dan penetapan APBD
2. Tahapan pelaksanaan yang meliputi laporan pelaksanaan kegiatan, tinjauan lapangan, laporan masyarakat, dan dengar pendapat dengan mitra.
3. Tahap pertanggung jawaban yang disampaikan oleh pemerintah yakni dilihat dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban pemerintah dan laporan pertanggungjawaban Pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah.

Disamping itu, DPRD juga melaksanakan beberapa cara dalam mengukur kinerja pemerintah dalam anggaran pendapatan belanja daerah ,yaitu dengar pendapat dengan mitra, melakukan kunjungan kerja, pembentukan pansus serta pembentukan panitia kerja yang dibentuk sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD Kabupaten Pasaman .

Dalam pelaksanaan pengawasan DPRD pada dasarnya tentu mengacu pada pasal 42 ayat (1) huruf c UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 dan mekanismenya didasarkan pada Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Pasaman. Perlu juga diingat bahwa pengawasan merupakan fungsi yang paling intensif yang dilakukan DPRD, bahwa bagaimana DPRD menjalankan fungsi pengawasannya baik secara politik maupun administratif melalui semua peran

dan alat kelengkapannya (Pimpinan, Komisi, Panitia Musyawarah, Badan Kehormatan, Panitia Anggaran, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan) dengan menyampaikan pertanyaan, melakukan interpelasi maupun angket, serta pendidikan politik dalam setiap kegiatannya. Tentu kepada semua objek yang diawasi, khususnya dalam kinerja eksekutif.

Sebagaimana disampaikan di awal bahwa efektifitas DPRD dalam melaksanakan peran dan fungsi pengawasan sangat tergantung pada kapasitas para anggotanya dalam menjalankan aktifitas pengawasannya. Untuk ini tentu memerlukan pola pikir yang independen, tidak memihak, bebas dari intervensi serta adanya akses yang baik terhadap riset dan fasilitas kantor. Kewenangan yang lemah, kepemimpinan yang tidak efektif dan staf administrasi yang kurang terlatih serta kurangnya informasi adalah faktor faktor yang menghambat efektifitas dan demokrasi.

2.7 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah

Salah satu bentuk fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD adalah meminta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepala daerah. LKPj merupakan salah satu kewajiban konstitusional yang harus disampaikan Kepala Daerah, baik setelah berakhirnya tahun anggaran maupun pada akhir masa jabatannya. Kewajiban tersebut merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan pelaksanaan dari amanat

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 27 Ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Pelaksanaan laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah secara teknis diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.

Amanat dari peraturan tersebut di atas menyatakan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah merupakan “progress report” pelaksanaan tugas atau laporan pencapaian kinerja dalam satu tahun anggaran. Dengan adanya LKPJ diharapkan dapat terwujud adanya akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

LKPJ merupakan laporan yang disampaikan oleh kepala daerah setiap tahun dalam sidang Paripurna DPRD yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas otonomi dan tugas pembantuan Pada saat tersebut, DPRD harus memberikan penilaian terhadap kinerja Kepala Daerah dalam melaksanakan pembangunan yang telah diamanahkan.

Penilaian kinerja yang dilakukan oleh DPRD tersebut sekurang-kurangnya meliputi penilaian terhadap :

- a. Tingkat capaian kinerja sasaran yang mengukur seberapa jauh Kepala Daerah telah berhasil mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah dirumuskan dalam Dokumen perencanaan (renstra).
- b. Efektivitas pelaksanaan pembangunan yang mengukur seberapa jauh hasil pembangunan tersebut telah sesuai dan memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat baik dalam peningkatan kesejahteraan, kualitas pelayanan aparatur maupun kondisi makro daya saing daerah.
- c. Efisiensi pengelolaan sumber daya baik sumber daya alam maupun sumber dana yang digunakan dalam proses pembangunan.
- d. Kualitas dan ketaatan terhadap peraturan perundangan serta asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih dari KKN (*good governance*)

Sesuai dengan prinsip anggaran berbasis kinerja, maka seharusnya laporan realisasi perhitungan APBD dilengkapi dengan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah yang diwujudkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP) sesuai dengan Inpres 7 tahun 1999.

Dengan keterbatasan kompetensi DPRD untuk menilai kinerja laporan keuangan tersebut, DPRD dapat mengoptimalkan segala sumber daya yang ada dengan melakukan sinergi dengan aparat pengawasan lain yang terkait untuk melakukan analisis terhadap kinerja pemerintah daerah tersebut. Selain itu, dukungan staf/ tenaga ahli dapat dioptimalkan untuk melakukan penilaian kinerja

pemerintah daerah melalui LKPJ tersebut. Namun demikian, DPRD masih dapat juga memanfaatkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai dasar untuk melakukan penilaian kinerja dalam LKPJ tersebut. Pasal 184 UU 32 tahun 2004 menyatakan bahwa LKPJ Pelaksanaan APBD disampaikan oleh Bupati/Bupati/Walikota kepada DPRD dalam bentuk laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dengan mengorganisasikan segenap potensi dan jaringan aliansi strategis yang ada, maka efektivitas dan obyektivitas DPRD dalam melakukan penilaian kinerja pemerintah daerah melalui LKPJ akan menghasilkan penilaian yang obyektif, tepat dan akurat.

Pentingnya fungsi pengawasan DPRD sangat diperlukan, hal ini disampaikan oleh pakar otonomi daerah Muhammad Ryaas Rasyid (1997 : 162), yang menjelaskan bahwa Fungsi pengawasan sangatlah penting dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengimbangi dan menjadi alat kontrol kekuasaan eksekutif daerah. Pendapat Muhammad Ryaas Rasyid tersebut sejalan dengan pendapat A.M. Fatwa (2002 : 29), yang berpendapat bahwa Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap pemerintah daerah adalah memang bagian dari penguatan demokrasi, sebab dalam demokrasi haruslah ada *chek and balances*, keseimbangan kekuasaan. Dari nilai-nilai demokrasi dapat tumbuh subur, pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah itu haruslah dianggap sebagai penjelmaan aspirasi masyarakat yang diwakilinya melalui proses Pemilihan Umum.

Pendapat Muhammad Ryaas Rasyid dan A.M. Fatwa tersebut mengungkap masalah pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah, pelaksanaan keputusan Bupati dan kebijakan pemerintah daerah yang menyentuh langsung kepada masyarakat, sehingga dampak kebijakan tersebut dirasakan langsung oleh masyarakat, maka dengan itu menjadi tugas DPRD untuk melakukan fungsi pengawasannya sebagai wujud pertanggung jawaban DPRD kepada masyarakat yang diwakilinya.

Inti dari fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD yaitu bagaimana menciptakan kebijakan pemerintahan daerah yang berpihak kepada masyarakat dan bagaimana terciptanya kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Dengan tercapainya cita-cita otonomi daerah, maka pembangunan di daerah akan terus tumbuh dan berkembang.

Dengan fungsi pengawasan ini diharapkan DPRD dapat mengarahkan sekaligus mengawal/mengendalikan arah pembangunan dan pemerintahan di daerah agar sesuai dengan tujuan yaitu kesejahteraan masyarakat. Di satu sisi kewenangan tersebut menuntut kapabilitas DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Namun di sisi lain dalam pelaksanaannya, kewenangan tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan kapabilitas yang memadai dari DPRD.

2.8 Rencana Strategis Daerah

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan taktis strategis yang menjabarkan potret permasalahan pembangunan daerah serta

indikasi daftar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan guna memecahkan masalah secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD setempat, dengan mengutamakan kewenangan wajib sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, telah memberikan kewenangan otonomi kepada setiap daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab. Dalam undang-undang ini, daerah mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan persoalan-persoalan pembiayaan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi hasil pembangunan sesuai dengan standar, norma dan kebijakan Pemerintah kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal serta agama.

Daerah juga mendapat kewenangan untuk menyelenggarakan perizinan usaha baik bagi investor dalam negeri maupun investor asing serta dapat pula melakukan pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri. Dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Daerah Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan penuh dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut bidang pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanian, koperasi, dan tenaga kerja dengan tujuan untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan peran serta masyarakat serta pengembangan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selanjutnya dalam Pasal 78 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 ditegaskan bahwa seluruh kegiatan yang berkaitan dengan

penyelenggaraan tugas pemerintahan tersebut dibiayai dan atas beban APBD. Hal ini berarti bahwa setiap daerah Kabupaten dan kota harus mampu menggali sumber keuangan sendiri secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh setiap daerah, yang didukung oleh perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.

Di lain pihak, seluruh lapisan masyarakat yang ada di daerah berharap kondisi kehidupan mereka menjadi lebih baik, seiring dengan diberlakukannya Undang-undang yang mengatur tentang Otonomi Daerah. Oleh karena itu setiap penyelenggaraan kegiatan yang berkaitan dengan kewenangan daerah harus melibatkan seluruh unsur masyarakat, karena pada dasarnya pembangunan dilaksanakan dari, oleh dan untuk seluruh masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan. Dengan kata lain bahwa masyarakat harus diberdayakan melalui peran aktifnya dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring kegiatan pembangunan di daerah.

Kegiatan penyusunan rencana strategis (Renstra) ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja kelembagaan daerah dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pasaman dalam kurun waktu lima tahun ke depan sejak dilantikannya Bupati, sehingga dapat mempercepat proses peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pasaman dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara khusus, tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Pasaman ini adalah :

1. Untuk menjaga konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sehingga pembangunan dapat mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan dan pada pencapaian visi.
2. Untuk menjamin komitmen bersama masyarakat Kabupaten Pasaman terhadap program dan kegiatan yang telah disepakati oleh semua *stakeholders* pembangunan daerah.
3. Untuk memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah Kabupaten Pasaman selama lima tahun yang akan datang.
4. Untuk mengoptimalkan kapasitas daerah dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
5. Sebagai alat ukur kinerja Pemerintah Kabupaten Pasaman.

Rencana strategis ini merupakan dokumen perencanaan strategis untuk menjabarkan potret permasalahan Umum Kabupaten Pasaman seperti yang telah dituangkan dalam indikasi daftar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan tersebut secara bertahap. Sasaran dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Pasaman ini adalah :

1. Tersusunnya dokumen perencanaan taktis strategis sebagai alat bantu yang terukur bagi rujukan penilaian kinerja Pemerintah Daerah;
2. Terencananya pembangunan yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan dengan tahapan yang jelas;
3. Terencananya sistem manajemen pembangunan dengan prinsip profesionalitas dan akuntabilitas.

2.9 Defenisi Operasional

Sesuai dengan teori yang dikemukakan Singarimbun (1995;46) defenisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Artinya, defenisi operasional meliputi tentang indikator indikator yang akan digunakan untuk mengukur variabel. Dan yang menjadi perasionalisasi dalam penelitian ini adalah pengawasan DPRD Kabupaten Pasaman dalam mengawasi pelaksanaan anggaran pendapatan daerah Kabupaten Pasaman pada tahun 2009. Sedangkan aspek-aspek yang turut melingkupi defenisi operasional pengawasan DPRD dan penilaian anggaran pendapatan belanja daerah yaitu :

1. Pengawasan DPRD

- a. Aspek standart kegiatan pengawasan , yaitu bagaimana tata tertib atau mekanisme serta standar kegiatan pengawasan yang dilakukan DPRD Kabupaten Pasaman terkait pengawasan terhadap pelaksanaan APBD tahun 2010 yang disampaikan pada LKPj.
- b. Aspek kegiatan penilaian yaitu ukuran-ukuran atau tingkatan penilaian yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Pasaman terkait pengawasan terhadap pelaksanaan APBD tahun 2010. Baik penilaian yang disimpulkan dalam laporan Komisi, pandangan fraksi, kemudian keputusan DPRD serta penilaian selama masa pelaksanaan anggaran dalam agenda-agenda DPRD.

- c. Aspek kegiatan perbaikan yaitu bagaimana dan kegiatan apa saja yang dilakukan DPRD Kabupaten Pasaman terkait pengawasan terhadap pelaksanaan APBD tahun 2010.

2. Pelaksanaan APBD / LKPj Bupati

- a. Aspek Pengelolaan, yaitu menggambarkan bagaimana APBD Kabupaten Pasaman dikelola, apakah sesuai dengan prinsip atau aturan-aturan yang berlaku dalam pelaksanaan APBD.
- b. Aspek Laporan (LKPJ), yaitu bagaimana Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah dalam pelaksanaan APBD yang dibuat dan disampaikan, apakah memenuhi kriteria atau standart laporan.

2.10. Konsep Operasional

Konsep Operasional dalam penelitian digunakan untuk menggambarkan secara tepat tentang masalah atau fenomena yang hendak diteliti. Bahwa konsep haruslah juga memenuhi syarat, salah satunya adalah harus diterjemahkan ke hal lebih konkrit atau mudah dipahami, karena semakin abstrak rumusan konsep akan semakin sulit pula memahami maknanya dalam realitas (Suyanto, 2005:50).

Selanjutnya konsep operasional yang digunakan dalam penelitian ini berpedoman kepada UU No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang salah satu isinya membahas tentang fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Adapun variabel pengawasan terhadap pelaksanaan APBD yang dimaksud adalah :

1. Perencanaan Pengawasan yang menyangkut seluruh proses penyusunan, pembahasan, dan penetapan APBD.
 - a. Untuk mengetahui bagaimana penyusunan APBD Kabupaten Pasaman.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembahasan APBD Kabupaten Pasaman
 - c. Untuk mengetahui bagaimana penetapan APBD Kabupaten Pasaman
2. Tahapan pelaksanaan yang meliputi laporan pelaksanaan kegiatan, tinjauan lapangan, laporan masyarakat, dan dengar pendapat dengan mitra.
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan oleh pemerintah Kabupaten Pasaman dari APBD.
 - b. Untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan di lapangan oleh pemerintah Kabupaten Pasaman
 - c. Mendengarkan laporan masyarakat tentang pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pasaman.
 - d. Mendengarkan hasil dengar pendapat antara pemerintah dengan mitra.
3. Tahap pertanggung jawaban yang disampaikan oleh pemerintah yakni dilihat dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban pemerintah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Mendengarkan, menilai, dan memutuskan untuk memberikan rekomendasi kepada kepala daerah terhadap hasil Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kualitatif. Dari hasil menyimpulkan definisi yang diajukan para pakar, dalam bukunya Metode Penelitian Kualitatif, Lexy J. Moloeng (2004:6) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Menurut Nasution (2003:18) penelitian kualitatif disebut juga penelitian naturalistik, karena dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam setting latar yang alamiah atau natural. Penelitian kualitatif pada hakekatnya ialah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya. Untuk itu peneliti harus terjun kelapangan dan berada disana dalam waktu yang cukup lama. Apa yang dilakukan oleh peneliti kualitatif banyak persamaannya dengan detektif atau mata-mata, penjelajah, atau jurnalis yang juga terjun ke lapangan untuk mempelajari manusia tertentu dengan mengumpulkan data yang banyak. (Nasution, 2003:5)

3.2 Lokasi Penelitian

Tempat penelitian yang dipilih penulis disesuaikan dengan judul penelitian yaitu tentang pengawasan DPRD Kabupaten Pasaman terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabuapten Pasaman tahun anggaran 2009, maka penulis memfokuskan penelitian pada Kantor Sekretariat DPRD Kabuapten Pasaman, pemilihan lokasi penelitian ini berdasarkan pertimbangan bahwa sumber data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan ini berada di Sekretariat DPRD Kabupaten Pasaman

3.3 Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2004 : 72), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Berdasarkan penjelasan tersebut maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota DPRD Kabupaten Pasaman yang berjumlah 30 orang.

Menurut Singarimbun (1989 : 152) ,sampel diartikan sebagai bagian dari populasi yang menajadi bagian dari sumber data yang sebenarnya,dengan kata lain sampel adalah bagian dari populasi. Pengambilan sebagian itu dimaksudkan sebagai representatif dari seluruh populasi,sehingga kesimpulan juga berlaku bagi seluruh populasi. Dalam penelitian ini, tekhnik penentuan sampel yang digunakan adalah **Purposive Sampling**. Menurut Mustafa (2000 :35) pengambilan sampel diambil dengan maksud atau tujuan tertentu. Seseorang atau sesuatu diambil

sebagai sampel karena peneliti menganggap bahwa seseorang atau sesuatu tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitiannya.

Untuk lebih jelasnya tentang populasi dan sampel akan dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1 Populasi Dan Sampel Penelitian

NO	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Sampel
1	Fraksi Partai Golkar	7 Orang	1
2	Fraksi Partai Demokrat	5 Orang	1
3	Fraksi PAN	3 Orang	1
4	Fraksi PPP	4 Orang	1
5	Fraksi PKB	3 Orang	1
6	Fraksi PKPB	5 orang	1
7	Fraksi Pasaman Saiyo	3 Orang	1
JUMLAH		30 Orang	7 orang

Berdasarkan judul penelitian penulis yang memfokuskan kajian terhadap fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Pasaman, maka sampel yang dipilih adalah keterwakilan satu orang pada setiap fraksi atau komisi yang membidangi pengawasan terhadap pengelolaan anggaran. Alasan pemilihan satu orang setiap fraksi atau komisi dengan pertimbangan bahwa di dalam Pasal 77 UU nomor 27 tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD menyatakan, bahwa DPRD (sebagai sebuah lembaga, bukan anggota DPRD secara individual) mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Selanjutnya dalam pasal 78 disebutkan, bahwa salah satu tugas dan wewenang DPRD (sebagai sebuah lembaga, bukan anggota DPRD secara individual) adalah

melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Perundang-undangan lainnya, keputusan kepala daerah, APBD, kebijakan Pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah.

Penekanan DPRD sebagai sebuah lembaga di sini sangat penting, mengingat di dalam undang-undang ini tidak ada satu pasal maupun satu ayatpun yang menyatakan bahwa anggota DPRD secara pribadi-pribadi mempunyai fungsi dan kewenangan di bidang pengawasan. Sebagai anggota DPRD, mereka hanya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 80 huruf (a) sampai dengan huruf (h), serta pasal 81 huruf (a) sampai dengan huruf (j). Dari penjelasan pasal demi pasal serta ayat demi ayat tersebut di atas dapat dipahami bahwa fungsi dan kewenangan pengawasan itu melekat pada DPRD sebagai sebuah lembaga/institusi dan bukan pada anggota DPRD secara perorangan. Artinya bila DPRD ingin menjalankan fungsi dan kewenangan di bidang pengawasan, mestinya dilakukan melalui alat kelengkapan DPRD seperti Komisi ataupun pandangan umum dari masing masing Fraksi.

Untuk memperkuat hasil penelitian, maka peneliti juga mengambil responden dari Kepala SKPD Kabupaten Pasaman, karena jumlahnya terlalu banyak maka peneliti mengambil sampel dengan cara **Purposive Sampling** yang mana pengambilan sampel diambil dengan maksud atau tujuan tertentu. Seseorang atau sesuatu diambil sebagai sampel karena peneliti menganggap bahwa seseorang atau sesuatu tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitiannya. **Mustafa (2000 :35)**. Adapun sampel yang penulis butuhkan yaitu kepala Dinas

Kesehatan, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum. Alasan pemilihan tiga SKPD di Kabupaten Pasaman tersebut dikarenakan ketiga SKPD tersebut berdasarkan hasil laporan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) ditemukan sejumlah dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Selain itu, penulis juga menjadikan Kepala bagian Risalah Persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Pasaman sebagai sampel dengan pertimbangan bahwa data sekunder yang penulis butuhkan bersumber dari bagian risalah dan persidangan.

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Data Primer

Data primer diperoleh dari responden yang merupakan anggota DPRD kabupaten Pasaman dan pimpinan SKPD Kabupaten Pasaman yang banyak terlibat dalam penggunaan APBD Kabupaten Pasaman yaitu Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan, dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara secara langsung. Data primer diperoleh langsung di lokasi Penelitian pada saat penelitian berlangsung. Sumber perolehan data primer mencakup transkrip wawancara dengan anggota DPRD Kabupaten Pasaman dan SKPD terkait. Selain itu, sumber data juga diperoleh dari transkrip hasil observasi pada kantor DPRD Kabupaten Pasaman.

3.4.2 Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh melalui study kepustakaan, study terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang fungsi Pengawasan DPRD. Data sekunder dapat diambil berupa risalah persidangan baik mengenai absensi maupun mengenai proses jalannya sidang serta kegiatan komisi atau fraksi yang selama bertugas di sekretariat DPRD Kabupaten Pasaman. Selain itu data sekunder yang dibutuhkan adalah naskah APBD Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2009, dan laporan hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Sumatera Barat tahun 2009. Disamping itu juga berpedoman kepada peraturan tata tertib DPRD Kabupaten Pasaman tahun 2009– 2014 dan peraturan perundangan lainnya yang relevan dengan judul skripsi penulis.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut :

1. Observasi, yaitu penulis mengadakan pengamatan langsung kelokasi penelitian, sehingga hasil yang diperoleh sesuai dengan kondisi dilapangan. Hal yang akan di observasi adalah kehadiran anggota dewan dalam mengikuti rapat dewan.
2. Wawancara, wawancara dilakukan antara penulis dengan anggota DPRD Kabupaten Pasaman selaku sampel dalam penelitian ini. Adapun tehnik wawancara dilakukan agar data/ informasi dapat diperoleh secara langsung dan mendalam serta bisa dipertanggungjawabkan.

3. Dokumentasi, yaitu cara pengumpulan data dari dokumen-dokumen yang tersimpan pada lokasi penelitian.
4. Kepustakaan, yaitu upaya mengumpulkan bahan-bahan bacaan literatur, buku-buku dan artikel-artikel yang berhubungan dengan penelitian.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis secara diskriptif kualitatif yakni analisa dengan memaparkan fakta-fakta dari hasil penelitian penulis di lapangan untuk selanjutnya ditarik kesimpulan sesuai dengan fakta yang ada dengan tetap mengacu pada tujuan penelitian.

Data yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini diteliti kembali guna mengetahui kelengkapan data yang diperoleh, sehingga apabila terdapat kekurangan atau hal-hal yang kurang jelas dapat dilengkapi kembali.

Analisis data pada tahap selanjutnya adalah untuk menyederhanakan data agar menjadi informasi yang dapat digunakan dalam menjelaskan permasalahan penelitian. Setelah informasi dianggap cukup memadai langkah yang dilakukan untuk menganalisis data yaitu melakukan penyederhanaan informasi yang diperoleh dengan memilah-milah informasi berdasarkan kategori yang disiapkan dalam daftar wawancara dengan menggunakan teori-teori maupun pendapat yang disinggung dalam tinjauan pustaka sehingga dapat ditafsirkan untuk merumuskan kesimpulan penelitian.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

5.1 Gambaran Umum Kabupaten Pasaman

Kabupaten Pasaman merupakan salah satu dari 19 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat, dengan luas wilayah 3.947,63,08 Km² yang terdiri dari 12 kecamatan dan 32 Nagari. Secara geografis dilintasi khatulistiwa dan berada pada 0⁰55' Lintang Utara sampai dengan 0⁰6' Lintang Selatan dan 99⁰45' Bujur Timur sampai dengan 100⁰21' Bujur Timur. Ketinggian antara 50 meter sampai dengan 2.240 meter di atas permukaan laut. Pada beberapa kecamatan terdapat beberapa gunung, seperti Gunung Ambun di Bonjol, Gunung Sigapuak dan Kulabu di Dua Koto, Malengang di Rao, dan Gunung Tambin yang merupakan gunung tertinggi di wilayah ini terletak di Kecamatan Lubuk Sikaping.

Wilayah Kabupaten Pasaman merupakan Kabupaten paling Utara dari Provinsi Sumatera Barat dan berbatasan dengan :

- a. Bagian Utara : Kabupaten Mandailing Natal dan Kab. Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara.
- b. Bagian Timur : Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau .
- c. Bagian Selatan : Kabupaten Agam.
- d. Bagian Barat : Kabupaten Pasaman Barat.

Berdasarkan data yang tersedia, dari 394.763 Ha luas lahan di Kabupaten Pasaman sekitar 48,24 persen diantaranya adalah kawasan hutan, 19,07 persen atau 75.277 Ha adalah padang rumput, sawah 26.532,38 Ha atau 6,72 persen, lahan perkebunan dan ladang sebesar 41.436,79 Ha atau 10,49 persen. Sedangkan untuk kawasan industri relative sedikit sekali yakni 0,01 persen dari total luas wilayah Kabupaten Pasaman.

Penduduk Kabupaten Pasaman menurut hasil sensus penduduk tahun 2010 berjumlah 253.299 jiwa dengan komposisi 125.249 jiwa laki-laki dan 128.050 jiwa perempuan. Penduduk tersebut tersebar dalam 12 kecamatan di Kabupaten Pasaman. Jika dilihat dari distribusi penduduk perkecamatan, jumlah penduduk terbesar berada di kecamatan Lubuk Sikaping sebagai ibukota Kabupaten yakni 43.746 jiwa.

Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS Kabupaten Pasaman, banyaknya angkatan kerja di Kabupaten Pasaman tahun 2010 sebanyak 117.096 jiwa dari jumlah penduduk umur 10 tahun ke atas yang berjumlah sebanyak 193.417 jiwa. Terdiri dari bekerja sebanyak 111.840 jiwa dan mencari pekerjaan sebanyak 5.256 jiwa. Penduduk yang bukan angkatan kerja berjumlah 76.321 jiwa, terdiri dari yang bersekolah 41.746 jiwa, mengurus rumah tangga 26.011 jiwa dan lainnya seperti pensiunan, jompo sebanyak 8.564 jiwa.

Sektor pertanian merupakan sektor paling dominan sebagai lapangan usaha penduduk Kabupaten Pasaman pada tahun 2010. Ini terlihat dari kontribusinya dalam penyerapan tenaga kerja yang mencapai 86.145 jiwa dari

penduduk yang bekerja. Di ikuti oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran sebanyak 8.517 jiwa dan sektor jasa jasa sebanyak 6.958 jiwa. Sedangkan untuk sektor industri terlihat masih belum berkembang di Kabupaten Pasaman ini. Jumlah tenaga kerja yang berusaha di sektor ini hanya sebanyak 3.342 jiwa atau berada pada urutan ke 4 (empat) dalam sektor usaha di Kabupaten Pasaman.

Status pekerjaan penduduk Kabupaten Pasaman masih di dominasi oleh pekerja keluarga yaitu 28.832 jiwa, hal ini terjadi karena banyaknya penduduk yang bekerja di sektor pertanian yang biasanya dilakukan oleh pihak keluarga petani atau sektor perdagangan informal yang banyak dibantu oleh keluarganya.

5.2 Gambaran Umum DPRD Kabupaten Pasaman

Sebagai demokrasi yang berdasarkan pancasila maka sarana azas pelaksanaan kedaulatan rakyat salah satunya dilaksanakannya pemilihan umum (pemilu). Semenjak masa orde baru pemilihan umum telah dilaksanakan sebanyak 9 kali, yaitu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004 dan 2009. Pada pemilu yang dilaksanakan pada tahun 2009 di Kabupaten Pasaman, tercatat sebanyak 821 TPS dengan jumlah pemilih sebanyak 169.200 orang yang dibagi kedalam 3 (tiga) daerah pemilihan (dapil) yaitu Dapil 1 (satu) meliputi kecamatan Lubuk Sikaping, Kecamatan Bonjol, Kecamatan Simpang Alahan Mati dan Kecamatan Tigo Nagari. Dapil 2 (dua) meliputi Kecamatan Panti, Kecamatan Padang Gelugur, Kecamatan Duo Koto, dan Kecamatan Rao. Sedangkan dapil 3 (tiga) yakni Kecamatan Rao Utara, Kecamatan Rao Selatan, Kecamatan Mapat Tunggul dan Kecamatan Mapat Tunggul Selatan.

Dari hasil pemilu tahun 2009 terpilihlah 30 orang anggota DPRD Kabupaten Pasaman yang berasal dari 12 partai politik. Anggota DPRD Kabupaten Pasaman terdiri dari 29 orang laki laki dan 1 orang perempuan, seperti yang terlihat dalam tabel :

Tabel 4.1. Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Pasaman menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin

No	Partai Politik	Laki laki	Perempuan	Jumlah
1	Partai Golongan Karya	6	1	7
2	Partai Demokrat	3	-	3
3	Partai Amanat Nasioanal	3	-	3
4	Partai Persatuan Pembangunan	3	-	3
5	Partai Kebangkitan Bangsa	3	-	1
6	Partai Keadilan Sejahtera	2	-	2
7	Partai Karya Perjuangan	1	-	3
8	Partai Bulan Bintang	1	-	1
9	Partai Republikan	1	-	1
10	Partai Karya Peduli Bangsa	3	-	3
11	Partai Hanura	2	-	2
12	Partai Bintang Reformasi	1	-	1
Jumlah		29	1	30

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Pasaman

Menurut UU No 27 Tahun 2009 tentang Susunan Kedudukan Anggota MPR, DPR, DPD, dan DPRD menyatakan bahwa seluruh partai politik yang memiliki wakilnya di DPRD harus tergabung dalam salah satu fraksi. Setiap fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi yang ada di DPRD. Mengingat jumlah komisi yang ada di DPRD Kabupaten Pasaman berjumlah 3 Komisi maka partai Politik yang wakilnya tidak mencukupi jumlah 3 orang diwajibkan bergabung dengan fraksi yang ada atau membentuk suatu fraksi gabungan. Berdasarkan ketentuan tersebut maka komposisi/susunan Fraksi yang ada di DPRD kabupaten Pasaman dapat dilihat dalam tabel 4.2 :

Tabel 4.2 Fraksi-Fraksi di DPRD Kabupaten Pasaman

No	Nama Fraksi	Jumlah Anggota	Asal partai
1	Fraksi Golongan Karya	7	Golongan karya
2	Fraksi Partai Demokrat	5	Demokrat, Hanura
3	Fraksi PAN	3	PAN
4	Fraksi PPP	4	PPP, PBB
5	Fraksi PKPB	5	PKPB,PKS
6	Fraksi PKB	3	PKB
7	Fraksi Pasaman Saiyo	3	PBR, Pakar Pangan,Republikan

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Pasaman

Anggota DPRD Kabupaten Pasaman dalam menjalankan tugasnya harus sesuai aturan yang berlaku yaitu harus menghormati dan mentaati Tata Tertib DPRD Kabupaten Pasaman No 01/KTSP/DPRD/PAS-2010 tentang penyempurnaan peraturan tata tertib DPRD Kabupaten Pasaman. Tata Tertib DPRD Kabupaten Pasaman merupakan aturan baku yang telah ditetapkan oleh ketua DPRD sebagai ketentuan yang harus dihormati dan ditaati oleh anggota DPRD Kabupaten Pasaman.

Kode Etik DPRD Kabupaten Pasaman adalah norma–norma atau aturan–aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal–hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD. Masyarakat berhak menilai sikap dan perbuatan anggota DPRD, jika ada perbuatan anggota yang kurang baik, masyarakat berhak melaporkannya ke Badan Kehormatan DPRD Pasaman untuk ditindaklanjuti. Keterangan mengenai beberapa hal yang telah diatur oleh Tata Tertib Kabupaten Pasaman bisa disimak seperti di bawah ini.

Alat kelengkapan DPRD Kabupaten Pasaman terdiri dari:

1. Pimpinan

DPRD Kabupaten Pasaman diketuai oleh Yasri dengan dibantu 2 Wakil Ketua yaitu Adri Umar, SPd dan Edi Ahmad. Kedudukan Yasri sebagai Ketua DPRD Kabupaten Pasaman baru dilantik pada tahun 2010 lalu karena Ketua DPRD sebelumnya, H. Benny Utama, SH,MM terpilih sebagai Bupati Kabupaten Pasaman periode 2010-2015.

Tabel 4.3 Pimpinan DPRD Kabupaten Pasaman

No	Nama	Jabatan	Asal Partai
1	Yasri	Ketua DPRD	Golongan Karya
2	Adri Umar, S.Pd	Wakil Ketua DPRD	Demokrat
3	Drs. Edi Ahmad, M.Si,MA	Wakil Ketua DPRD	PAN

Sumber :Sekretariat DPRD Kabupaten Pasaman

Menurut peraturan tata tertib DPRD Kabupaten Pasaman dan mengacu pada UU No 27 tahun 2009 tentang susunan dan Kedudukan MPR,DPR,DPD dan DPRD. Pimpinan DPRD mempunyai tugas:

- a. memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk mengambil keputusan
- b. menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan wakil-wakil ketua
- c. melakukan koordinasi dan upaya menyinergikan pelaksanaan agenddan materi kegiatan dri alat kelengkpan DPRD
- d. menyusun rencana anggaran DPRDbersama sekretariat DPRDyang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna
- e. menjadi juru bicara DPRD
- f. melaksanakan dan memasyarakatkan putusan DPRD

- g. mengadakan konsultasi dengan Bupati/pemerintah daerah dan instansi pemerintah lain sesuai dengan putusan DPRD
- h. mewakili DPRD dan atau alat kelengkapan DPRD di pengadilan
- i. melaksanakan keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
- j. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam Rapat Paripurna DPRD.

Pelaksanaan tugas Pimpinan dilakukan secara kolektif. Jika ketua berhalangan dalam melakukan tugasnya karena alasan tertentu dan dalam jangka waktu yang relatif singkat maka tugasnya dapat diwakilkan kepada Wakil Ketua. Jika Ketua berhalangan dalam jangka waktu lebih dari 30 hari maka pimpinan partai politik menggantikan wakilnya yang duduk sebagai Ketua DPRD dengan kadernya yang lain.

2. Badan Musyawarah

Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD bersifat tetap yang dibentuk oleh DPRD pada permulaan masa keanggotaan DPRD. Badan Musyawarah terdiri dari unsur-unsur fraksi berdasarkan pertimbangan jumlah anggota dan sebanyak-banyaknya tidak lebih dari separo jumlah anggota DPRD. Di Kabupaten Pasaman, Badan Musyawarah yang ada terdiri dari 15 orang anggota DPRD keterwakilan dari seluruh Fraksi yang ada. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4.4 Daftar Struktur Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Pasaman

No	Nama	Jabatan	Asal Fraksi
1	Yasri	Ketua	Golkar
2	Adri Umar, S.Pd	Wakil Ketua	Demokrat
3	Drs. Edi Ahmad, M.Si,MA	Wakil Ketua	PAN
4	Anasrullah, SH, MH	Sek bukan Anggota	Sekwan
5	Leon Fitra Irfan, ST	Anggota	Demokrat
6	Hj. Dasmairi Ruspa Novianti	Anggota	Golkar
7	Hamdan	Anggota	Golkar
8	H. Irian Nofri, S.Pd	Anggota	PAN
9	H. Fetris Oktriardi,SE,M.Si	Anggota	PPP
10	Nazaruddin Koto, SE.M.Si	Anggota	PPP
11	Jusran	Anggota	PKB
12	Syakban	Anggota	PKB
13	M. Shaleh Lubis, SE,Msi	Anggota	PKPB
14	Abdul Jamil	Anggota	PPB
15	Suharjono	Anggota	Pasaman Saiyo
16	Farizal, S.Pd	Anggota	Golkar

Sumber : DPRD Kabupaten Pasaman

Badan Musyawarah yang mempunyai tugas:

- a. memberikan pertimbangan tentang penetapan program kerja DPRD
baik diminta atau tidak diminta kepada pimpinan DPRD
- b. menetapkan kegiatan dan jadwal acara rapat DPRD
- c. memutuskan pilihan mengenai isi risalah rapat apabila timbul perbedaan pendapat
- d. memberi saran pendapat untuk memperlancar kegiatan
- e. merekomendasikan pembentukan panitia khusus dan yang diserahkan oleh rapat paripurna kepada badan musyawarah
- f. meminta dan atau memberi kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberi keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing masing

Setiap anggota Badan Musyawarah wajib untuk :

- a. Mengadakan konsultasi dengan Fraksi-Fraksi sebelum mengikuti rapat Badan Musyawarah
- b. Menyampaikan pokok pokok hasil rapat Badan Musyawarah kepada Fraksi

3. Komisi

Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap. Setiap anggota DPRD kecuali pimpinan DPRD diwajibkan menjadi salah satu anggota komisi. Penempatan anggota DPRD dalam Komisi diputuskan dalam rapat pimpinan atas usul fraksi dan dilakukan setiap awal tahun anggaran. Jumlah Komisi yang ada di Kabupaten Pasaman berjumlah 3 (tiga) komisi sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4.5 Komisi dan Lingkupan Kerja DPRD Kabupaten Pasaman

No	Komisi	Bidang	Cakupan Kerja
1	A	Pemerintahan, Hukum,dan Perundang-undangan	Pemerintahan, Kepegawaian/Aparatur, Hukum/Perundang-Undangan, Pertanahan,Ketertiban, Penerangan/PERS,Sosial Politik,Lingkungan Hidup, Perhubungan, Pasar, Pariwisata, Perizinan
2	B	Perekonomian, keuangan,dan pembangunan	Pekrjaan Umum, Pertambangan Dan Ekonomi, Pertanian, Tata Kota, Pertamanan, Kehutanan, Perikanan, Peternakan,Perdagangan, Perindustrian, Perkebunan, Pengadaan Pangan/Logistik, Koperasi Dan UKM, Keuangan Daerah, Perpajakan, Retribusi, Perbankan, Perusahaan Daeah/Perusahaan Patungan, Dunia Usaha, Penanaman Modal,Perumahan Rakyat

3	C	Kesejahteraan sosial	Pendidikan, Ketenagaa Kerjaan, Kesehatan Dan KB, PTEK, Kepemudaan Dan Pramuka, Olahraga, Agama, Seni Budaya, Sosial, Peranan Wanita, Transmigrasi, Kebersihan, Ormas.
---	---	----------------------	---

Sumber : Tata Tertib DPRD kabupaten Pasaman

Tugas komisi adalah:

- a. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan negara kesatuan RI dan daerah
- b. melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah, dan keputusan DPRD
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan sesuai dengan bidang komisi masing-masing
- d. membantu pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh kepala daerah dan masyarakat kepada DPRD
- e. menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat
- f. memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah
- g. melakukan kunjungan kerja komisi yang bersangkutan atas persetujuan pimpinan DPRD
- h. mengadakan rapat kerja dan dengar pendapat
- i. mengajukan usul kepada pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing komisi

- j. sekali seminggu mengadakan rapat-rapat internal membahas surat-surat masuk dan hal-hal lain yang dianggap perlu.
- k. memberikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

Dari 30 orang anggota DPRD Kabupaten Pasaman, 3 (tiga) orang merupakan Pimpinan DPRD dan 27 orang anggota lainnya tergabung ke dalam 3 (tiga) Komisi sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 4.6 Daftar Susunan Personil Komisi-Komisi DPRD
Kabupaten Pasaman Periode 2009-2014**

No	Nama	Jabatan Dalam Komisi	Asal Fraksi
1	Yasri	Penanggung Jawab	Golkar
2	Adri Umar, S.Pd	Wakil Penanggung jawab	Demokrat
3	Drs. Edi Ahmad, M.Si, MA	Wakil Penanggung Jawab	PAN
KOMISI A			
1	Drs. Syahrizal yusuf	Ketua	Golkar
2	H. Fetris Oktrihardi, SE, M.Si	Wakil Ketua	PPP
3	Abdul Jamil	Sekretaris	PKPB
4	Hamdan	Anggota	Golkar
5	Asraf	Anggota	Golkar
6	H. Aminullah, SH, M.Si	Anggota	PKB
7	Djoni Irdan Abidin, SH, M.Si	Anggota	PKPB
8	Leon Fitra Irfan, ST	Anggota	Demokrat
9	H. Irian Nofri, S.Pd	Anggota	PAN
KOMISI B			
1	Jusran	Ketua	PKB
2	H. Sodikin Nursewan	Wakil ketua	Golkar
3	H. Mulyadi	anggota	Demokrat
4	M. Saleh Lubis, SE, M.Si	Anggot	PKPB
5	Mawardi Mangku Alam, A.Md	Anggota	PAN
6	H. Erianto	Anggota	Demokrat
7	Suharjono	anggota	Pasaman Saiyo
8	Sawal Dt. Putiah	Anggota	PPP
9	Farizal, S.Pd	Anggota	Golkar

KOMISI C			
1	Ir. Bona lubis	Ketua	PPP
2	Syakban	Wakil ketua	PKB
3	S. Rajo Bungsu	Anggota	Demokrat
4	Khairuddin Simanjuntak	Anggota	Pasaman Saiyo
5	Heri Supridi, S.Ag	Anggota	PKPB
6	Hj. Dasmairi Ruspa Novianti	anggota	Golkar
7	Nazaruddin Koto, SE,M.Si	Anggota	PPP
8	Khairunnas Dt Rajo Malano	Anggota	PKPB
9	H. Ofri Benny	Anggota	Pasaman Saiyo

Sumber : DPRD Kabupaten Pasaman

4. Badan Legislasi Daerah

Badan legislasi merupakan alat kelengkapan yang bersifat tetap, dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan DPRD dalam rapat Paripurna DPRD. Jumlah anggota badan legislasi daerah setara dengan jumlah anggota satu komisi DPRD. Anggota badan legislsi daerah di usulkan masing-masing fraksi dengan perbandingan 1 (satu) orang mewakili 5 (lima) orang anggota dengan 3 (tiga) orang anggota atau lebih dibulatkan menjadi 1(satu).

Badan legislasi daerah DPRD Kabupaten Pasaman berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan 7 (tujuh) orang anggota yang mewakili masing-masing fraksinya. Masa jabatan badan Legislasi paling lama dua setengah (2,5) tahun dan dapat ditinjau kembali setelah satu tahun. Masa keanggotaan Bdan Legislasi daerah, dpat ditinjau setiap tahun anggaran. Susunan dan Komposisi Badan Legislasi DPRD Kabupaten Pasaman dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 4.7 Daftar Struktur Badan Legislasi Daerah
DPRD Kabupaten Pasaman**

No	Nama	Jabatan	Fraksi
1	Yasri	Penanggungjawab	Golkar
2	Adri Umar, S.Pd	Wk. Penanggungjawab	Demokrat
3	Drs. Edi Ahmad, M.Si	Wk. Penanggungjawab	PAN
4	H. Aminullah. SH.M.Si	Ketua merangkap anggota	PKB
5	Mawardi, Amd	Waka merangkap anggota	PAN
6	Anasrullah, SH,MH	Sekretaris bukan anggota	Sekwan
7	H. Erianto	Anggota	Demokrat
8	Farizal, S.Pd	Anggota	Golkar
9	H.Fetris, SE,M.Si	Anggota	PPP
10	Heri Supriadi, S.Ag	Anggota	PKPB
11	Suharjono	Anggota	Pasaman Saiyo
12	Drs. Syahrizal Yusuf	Anggota	Golkar
13	H. Ofri Benny	Anggota	Pasaman Saiyo

Sumber : DPRD Kabupaten Pasaman

Badan Legislasi daerah Kabupaten Pasaman mempunyai tugas :

- a. Menyusun rancangan program legislasi daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas, rancangan peraturan daerah beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran dilingkungan DPRD
- b. Koordinasi untuk penyusunan program legislasi daerah antara DPRD dan Pemerintah Daerah
- c. Menyiapkan rancangan peraturan daerah usul DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan
- d. Melakukan pegharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah yang diajukan anggota, komisi dan/atau gabungan komisi sebelum rancangan peraturan daerah tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPRD
- e. Memberikan pertimbangan terhadap rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota komisi atau gabungan komisi diluar prioritas

rancangan peraturan daerah tahun berjalan atau diluar rancangan peraturan daerah yang terdaftar dalam program legislasi daerah

- f. Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan peraturan daerah melalui koordinasi dengan komisi dan atau panitia khusus.
- g. Memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas rancangan peraturan daerah yang ditugaskan/dijadwalkan oleh badan musyawarah dan untuk dikonsultasikan
- h. Membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah dibidang perundang-undangan pada akhir masa keanggotaan
- i. Mengundang Bupati Pasaman, pakar dan masyarakat dalam melakukan pengkajian dan penelaahan atas rancangan peraturan daerah melalui Pimpinan DPRD Kabupaten Pasaman
- j. Meminta penjelasan dan masukan dari Bupati, pakar dan masyarakat berkenaan dengan pengkajian dan penelaahan atas rancangan peraturan daerah.

5. Badan Anggaran

Badan Anggaran terdiri dari pimpinan DPRD, satu wakil dari setiap komisi dan utusan fraksi berdasarkan pertimbangan jumlah anggota. Masa keanggotaan Badan Anggaran dapat ditinjau pada setiap tahun anggaran. Badan Anggaran terdiri dari 15 orang sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 4. 8 Tabel Struktur Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pasaman

No	Nama Anggota	Jabatan	Fraksi
1	Yasri	Ketua merangkap anggota	Golkar
2	Adri Umar, S.Pd	Wakil ketua merangkap anggota	Demokrat
3	Drs. Edi Ahmad, M.Si,MA	Wakil ketua merangkap anggota	PAN
4	Anasrullah SH.MH	Sekretaris bukan anggota	Sekwan
5	S. Rajo Bungsu	Anggota	Demokrat
6	H. Mulyadi	Anggota	Demokrat
7	Drs. Syahrizal Yusuf	Anggota	Golkar
8	Asraf	Anggota	Golkar
9	H. Sodikin Nursewan	Anggota	Golkar
10	Mawardi A.Md	Anggota	PAN
11	Sawal Dt Putiah, SH	Anggota	PPP
12	Ir. Bona Lubis	Anggota	PPP
13	H. Aminullah SH.M.Si	Anggota	PKB
14	Djoni Irdan Abidin,SH,M.Si	Anggota	PKPB
15	Khairunnas Dt Marajo	Anggota	PKPB
16	Khairuddin Simanjuntak	Anggota	Pasaman Saiyo

Sumber : DPRD Kabupaten Pasaman

Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pasaman mempunyai tugas:

- a. memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, lima bulan sebelum ditetapkan APBD, berupa pokok-pokok pikiran DPRD
- b. memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan penetapan, perubahan dan perhitungan APBD sebelum ditetapkan dalam Rapat Paripurna

- c. memberikan saran dan pendapat kepada DPRD mengenai Rancangan APBD, Rancangan APBD baik penetapan, perubahan dan perhitungan APBD yang telah disampaikan oleh Kepala Daerah
- d. memberikan saran dan pendapat terhadap rancangan perhitungan anggaran yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD
- e. menyusun anggaran belanja DPRD dan memberikan saran terhadap penyusunan anggaran belanja sekretariat DPRD.

6. Badan Kehormatan

Badan Kehormatan adalah alat kelengkapan DPRD Kabupaten Pasaman yang bersifat tetap, yang memilih dari dan oleh anggota DPRD, dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD. Badan kehormatan DPRD Kabupaten Pasaman terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan seorang anggota sebagai mana terlihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4.9 Strukurur Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Pasaman

No	Nama	Jabatan	Fraksi
1	Suharjono	Ketua	Pasaman Saiyo
2	Hamdan	Wakil ketua	Golkar
3	Sawal Dt. Putih	Anggota	PPP

Badan kehormatan mempunyai tugas :

- a. Mengamati, mengevaluasi disiplin, etika dan moral para anggota DPRD dalam rangka martabat dan kehormatan sesuai kode etik DPRD
- b. Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD serta sumpah/janji

- c. Melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan anggota DPRD, masyarakat dan atau pemilih
- d. Menyampaikan kesimpulan atas hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c sebagai rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh DPRD
- e. Menyampaikan rekomendasi kepada Pimpinan DPRD berupa rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD atas pengaduan Pimpinan DPRD, anggota DPRD, masyarakat dan atau pemilih.

7. Alat Kelengkapan Lainnya

Pimpinan DPRD Kabupaten Pasaman dapat membentuk alat kelengkapan lain yang diperlukan antara lain panitia khusus/panitia kerja dengan keputusan DPRD, atau usul dan pendapat anggota DPRD setelah mendengar pertimbangan panitia musyawarah dengan persetujuan rapat paripurna. Panitia khusus atau panitia kerja merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap yang anggotanya terdiri dari anggota komisi terkait yang mewakili semua fraksi yang ada dan bertugas membahas hal-hal yang dianggap khusus yang diselenggarakan untuk keperluan itu.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Pasaman terhadap Pelaksanaan APBD Kabupaten Pasaman Tahun 2009

Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasaman dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mampu memberikan gambaran yang jelas terutama tuntutan besarnya pembiayaan atas berbagai target sasaran yang hendak dicapai. Dengan demikian alokasi dana yang digunakan untuk berbagai program dan kegiatan dapat memberikan manfaat yang benar-benar dapat dirasakan masyarakat sebagai wujud pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan yang berorientasi kepada kepentingan publik.

Peranan DPRD dalam pembuatan APBD meliputi tahap perencanaan, pembahasan, pelaksanaan, pertanggung jawaban serta pengawasan. Tahap pengawasan inilah yang penting yang harus diperhatikan oleh DPRD, karena tahap ini dapat dilakukan mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pertanggung jawaban. Pengawasan terhadap APBD ini penting agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan apa yang telah diamanatkan oleh APBD. Dengan demikian pelaksanaan pengawasan anggaran daerah oleh DPRD sejak dini dapat dilakukan, yaitu mulai pembahasan RAPBD.

Untuk lebih memperjelas pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Pasaman dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran 2009, berikut penulis jelaskan mengenai tatacara pengawasan yang dilakukan oleh

DPRD Kabupaten Pasaman dan petikan wawancara dengan beberapa anggota DPRD Kabupaten Pasaman yang mewakili suara Fraksi nya.

Menurut **Nazaruddin Koto, SE,M.Si**, Anggota DPRD Kabupaten Pasaman dari Fraksi PPP menyatakan bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Pasaman terhadap pelaksanaan APBD dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) yaitu tahap pengawasan pada saat perencanaan atau penyusunan APBD oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang diketuai oleh Sekretaris Daerah, Pengawasan pada saat APBD di jalankan oleh kepala daerah dan SKPD , serta Pengawasan pada saat pelaporan penggunaannya oleh Kepala Daerah yang dalam hal ini Bupati Kabupaten Pasaman.

1. Tahapan Pengawasan Terhadap Perencanaan APBD

a. Penyusunan APBD Kabupaten Pasaman.

Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Pasaman dalam penyusunan APBD dilaksanakan pada saat RAPBD di ajukan oleh kepala Daerah. DPRD Kabupaten Pasaman mempunyai peran yang nyata dalam melakukan pengawasan terhadap penyusunan APBD terlebih lagi di dukung oleh fungsi DPRD yang lain yaitu fungsi anggaran, yang mana DPRD bersama pemerintah daerah terlibat bersama dalam penyusunan APBD. Hal ini disampaikan oleh Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pasaman, **Djoni Irdan Abidin, SH, M.Si** kepada penulis, seperti dikutip dibawah ini :

“ Pelaksanaan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengacu pada UU. No. 32 tahun 2004, dimana pemerintah daerah secara bersama-sama DPRD menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah “

Undang Undang 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa DPRD bersama Kepala Daerah menetapkan APBD. Tata cara dan prosedur penyusunan APBD sebagai berikut:

- a. Dalam rangka menyiapkan RAPBD, Pemerintah Daerah bersama DPRD menyusun arah dan kebijaksanaan umum APBD
- b. Berdasarkan arah dan kebijaksanaan umum APBD, Pemerintah daerah menyusun strategi dan prioritas APBD.
- c. Berdasarkan strategi dan prioritas yang telah ditetapkan, Pemerintah daerah menyiapkan RAPBD.
- d. Kepala Daerah menyerahkan RAPBD kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan.
- e. Sebelum disetujui, DPRD membahas RAPBD berdasarkan tata tertib yang ada.

Dengan keterlibatan anggota DPRD dalam pembahasan anggaran membuka peluang besar bagi DPRD dalam melakukan fungsi pengawasannya terhadap anggaran yang benar-benar ditujukan untuk program pro rakyat. Hal ini disampaikan oleh **Adri Umar, S.Pd** Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pasaman, berikut kutipannya :

“Dalam kaitannya dengan pengawasan anggaran daerah keterlibatan DPRD tercermin dalam pembentukan Badan Anggaran yang mempunyai tugas memberikan saran atau pendapat DPRD mengenai Nota Keuangan, RAPBD. Perubahan serta perhitungannya yang telah disampaikan oleh eksekutif, sehingga kita bisa melihat sejauh mana program yang direncanakan pemerintah daerah yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat, jika ada temuan program yang tidak jelas tentu akan kita ingatkan Bupati “

Dalam hal pengawasan dalam penyusunan APBD, DPRD berperan dalam menelaah berbagai aspek seperti kesesuaian anggaran dengan rencana pekerjaan. Jika hasil pembahasan yang dilakukan oleh DPRD terdapat ketidaksesuaian, maka DPRD berwenang memberikan usul untuk melakukan penyempurnaan sesuai petunjuk yang diberikan oleh DPRD. Hal ini ditegaskan oleh **Mawardi Mangku Alam**, seperti dikutip :

“Penyusunan APBD yang diajukan oleh pemerintah, kita sebagai pengawas meninjau porsi anggaran yang diberikan oleh pemerintah, apakah telah sesuai aturan atau belum, jika ada porsi yang tidak sesuai tentu akan kita tindak lanjuti “

Berbeda halnya dengan yang disampaikan oleh anggota lainnya, Anggota Fraksi Golkar, **Hamdan** menyatakan bahwa :

“Dalam proses penyusunan APBD, DPRD tidak ikut serta dalam penyusunan melainkan penyusunan tersebut dilakukan oleh pemerintah daerah bersama SKPD yang kemudian draf APBD yang akan ditetapkan diserahkan kepada DPRD untuk kemudian diperiksa”

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa DPRD tidak turut serta dalam penyusunan RAPBD, melainkan menunggu penyerahan hasil penyusunan APBD dari Pemerintah Daerah dan SKPD, sedangkan menurut Peraturan Daerah, pada proses penyusunan APBD, DPRD dan Pemerintah Daerah beserta SKPD harus bersama-sama merumuskan APBD tersebut sehingga DPRD dapat mengetahui secara pasti rincian dana yang dikeluarkan pada setiap program yang ditetapkan pada APBD, yang kemudian apabila terjadi penyimpangan terhadap penggunaan dana APBD tersebut pihak DPRD dapat langsung meng-diagnosis penyalahgunaan dana tersebut. Akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh

DPRD sehingga sering terjadi penyalahgunaan dana APBD oleh Pemerintah Daerah maupun SKPD.

Informasi yang penulis dapatkan tentang penyusunan APBD kabupaten Pasaman, RAPBD disusun oleh Tim Pelaksana anggaran Daerah yang aturan pembuatannya diatur oleh undang – undang. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang No. 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menegaskan bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun harus dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang wajib disusun oleh Kepala Daerah terpilih. Hal ini disampaikan oleh **Suhardjono** mewakili Fraksi Pasaman Saiyo yang menegaskan bahwa *RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah, yang dalam hal ini Bupati Pasaman yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Kabupaen Pasaman yang telah ditetapkan*. Beliau juga menambahkan :

“Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) ini dirinci tiap tahun untuk dijadikan sebagai Rencana Tahunan Daerah yang dikenal dengan nama Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang harus ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 82 ayat (2) bahwa penyusunan RKPD diselesaikan paling lambat akhir bulan Mei sebelum tahun anggaran berkenaan “

Djoni Irdan SH,M.Si dari Fraksi Partai Karya Peduli Bangsa ketika penulis meminta keterangannya menambahkan bahwa:

“ Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menjabarkan RPJMD yang sudah ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke dalam Rencana Strategis (Renstra SKPD). Renstra SKPD ini berisi

rencana tugas masing-masing unit dalam SKPD, yang secara keseluruhan digabung menjadi Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD) tersebut selanjutnya dirinci untuk tiap tahun sebagai Rencana Tahunan yang dikenal dengan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang sudah ditetapkan.

Hal senada juga disampaikan oleh **Yusran**, anggota DPRD Kabupaten Pasaman Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa :

“ Sebelum melakukan penyusunan APBD, dokumen perencanaan di daerah seperti RPJPD, RPJMD dan RKPD merupakan rangkaian dokumen yang menjadi dasar bagi penyusunan APBD atau pengelolaan keuangan daerah “

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Pasal 34 ayat (1) dinyatakan bahwa Kepala Daerah berdasarkan RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1), menyusun Rancangan Kebijakan Umum APBD. Sedangkan dalam Pasal 34 ayat (2) disebutkan bahwa Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Pedoman Penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun. Ketentuan di atas dipertegas lagi dalam Pasal 83 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa Kepala Daerah menyusun Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan RKPD dan Pedoman Penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun.

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Pasal 84 ayat (2), menyatakan bahwa setelah rancangan KUA dan PPAS disusun, Sekretaris Daerah selaku ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah

(TAPD), menyampaikan rancangan KUA dan PPAS kepada Kepala Daerah paling lambat Minggu I (Pertama) Bulan Juni setiap tahun.

Sesuai ketentuan dalam Pasal 87 ayat (1), kedua dokumen perencanaan tersebut, yaitu Rancangan KUA dan Rancangan PPAS selanjutnya disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam forum pembicaraan pendahuluan mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran berikutnya, paling lambat Pertengahan Bulan Juni.

Melihat tata aturan penyusunan APBD yang begitu panjang di pemerintah daerah, penulis juga menemui tiga SKPD terkait guna meminta keterangan tentang penyusunan APBD Kabupaten Pasaman. **Dra. Ezmita Arbi** selaku Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura ketika menyatakan bahwa :

“ Peran Pemerintah daerah dalam penyusunan APBD memang sangat Dominan sekali. Dalam penyusunannya, kami selaku kepala Dinas merupakan anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang bertugas menyusun porsi anggaran yang dibutuhkan daerah “

Tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh **Dr. Yahya**, selaku kepala Dinas Pendidikan ketika penulis meminta pendapatnya, beliau menanggapi :

“ Seluruh SKPD merupakan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD). TPAD diketuai oleh Sekretaris Daerah. Secara bersama kami menyusun APBD dengan memperhatikan kebutuhan pada masing-masing Dinas yang kami pegang”

Melihat apa yang diutarakan oleh Kepala Dinas, jelas terlihat bahwasanya peran penyusunan APBD sangat di dominasi oleh Pemerintah daerah, hal ini dibenarkan juga oleh Kepala Dinas Kesehatan, **dr. H. Idrus, M.Kes.** beliau menyatakan :

“ selaku Kepala dinas, puncak anggaran memang kami yang menyusun. Tugas Dewan yakni meninjau kembali apa yang telah kami rumuskan. Sedangkan perencanaan awal dan besaran dana, kami selaku TPAD lah yang mempunyai kewenangan yang nyata saat ini “

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan tersebut dengan beberapa anggota DPRD Kabupaten Pasaman dan Kepala Dinas dapat disimpulkan bahwasanya tahap penyusunan APBD dilakukan oleh pemerintah daerah, dalam segi penetapan anggaran lebih banyak di dominasi oleh peran pemerintah daerah. Untuk pengawasan yang dilakukan dalam tahapan penyusunan ini terkesan kurang jelas karena penyusunan APBD dilakukan oleh pemerintah daerah seutuhnya, sedangkan keterlibatan DPRD hanya dalam tahapan pelaksanaan pembahasan bersama dengan Bupati.

b. Pelaksanaan Pembahasan APBD Kabupaten Pasaman

Mekanisme pembahasan yang dilakukan antara Pemerintah Daerah dan DPRD menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan tata tertib DPRD Kabupaten Pasaman antara lain dengan melalui rapat-rapat kerja dengan SKPD. Hal ini di utarakan oleh **Djoni Irdan Abidin SH,M.Si** dari Fraksi Partai Karya Peduli Bangsa, yang menyatakan bahwa *“ Pembahasan APBD di legislatif telah ditetapkan menurut perundangan yang berlaku, kita ada badan anggran yang membidangi masalah anggran, termasuk didalamnya masalah APBD “*

Dari pendapat yang disampaikan oleh bapak Djoni Irdan maka dapat diketahui fungsi pengawasan DPRD dalam tahapan pembahasan di DPRD dikelola oleh badan anggaran. Setelah melalui pembahasan di DPRD antara pemerintah daerah dan DPRD, jika telah menemukan atau menghasilkan

kesepakatan dalam bentuk keputusan bersama, maka dianggap bahwa pembahasan pada tingkat daerah di DPRD sudah berakhir, untuk dilanjutkan pada tahap berikutnya.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Pasal 45 ayat (1) dinyatakan bahwa Pengambilan keputusan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. Setelah penandatanganan persetujuan bersama antara Kepala daerah dengan DPRD selesai, maka pembahasan rencana kegiatan dan anggaran (RAPBD) telah berakhir, dan atas dasar keputusan bersama terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD seperti tersebut di atas, Kepala Daerah selanjutnya menyusun Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.

Dalam hasil wawancara tentang pelaksanaan pengawasan yang penulis lakukan dengan bapak **Nazaruddin Koto, SE, M.Si**, Anggota Dewan dari Fraksi PPP berpendapat bahwa : “ *pelaksanaan pembahasan APBD dikelola oleh Badan Anggaran yang mencermati setiap pembiayaan atas belanja Daerah.*

Dalam mekanisme yang dijalankan oleh Badan Anggaran, penulis juga meminta informasi kepada bapak **Adri Umar, S.Pd** dari Fraksi Demokrat yang juga merupakan anggota Badan Anggaran, beliau berpendapat bahwa :

“ *Semua perencanaan keuangan daerah yang dituangkan dalam APBD dibahas oleh Badan Anggaran yang merupakan representasi dari semua Fraksi. Dari banggar, semua nya juga berpulang lagi kepada suara Fraksi dalam membarikan pandangan umumnya di Banggar*”

Dari pendapat yang diutarakan oleh bapak Adri Umar tersebut membuka cakrawala berfikir kita bahwasanya pelaksanaan pengawasan pada anggaran tidak terlalu di cover secara baik, artinya masih ada peluang-peluang yang muncul untuk meloloskan anggraan yang tidak dibutuhkan karena masih adanya kesempatan lobby pada tingkatan fraksi. Hal ini dibenarkan oleh **Suhardjono** dari Fraksi Pasaman Saiyo :

“ APBD yang telah dibahas oleh banggar, nanti akan berpulang lagi di Fraksi untuk mendapatkan pendapat Fraksi pada rapat banggar. Kalau suara fraksi kuat di baanggar tentu angaran yang tidak sepatutnya bisa saja diloloskan. “

Menanggapi pendapat yang disampaikan oleh bapak suhardjono, penulis mencoba mencari celah kebenaran dengan mewawancarai pihak SKPD yang dalam hal ini diwakili oleh kepala Dinas Kesehatan, bapak **dr. Idrus, M.Kes**

“ RAPBD yang kami ajukan ke Dewan, setelah dibahas oleh Dewan sebelum dietetapkan Perdanya kadang memang mengalami perubahan dalam besarnya porsi anggraan. Untuk itu kami sebagai pelaksana tugas, hanya menjalankan apa yang ditugaskan”

Dalam hal pengawasan DPRD terhadap APBD Kabupaten Pasaman, penulis juga mengutarakan pertanyaan seputar hasil laporan Pemeriksaan BPK RI yang menyatakan bahwa APBD Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2009 banyak ditemui penyimpangan dana, diantaranya dari Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Kesehatan. DPRD menjawab bahwasanya kasus tersebut memang menjadi perhatian bagi masyarakat Kabupaten Pasaman, akan tetapi pengawasan DPRD tidak bisa terlalu jauh masuk ke dalam ranah penggunaan dana oleh Dinas karena batasan tugas oleh DPRD hanya sebatas konteks pengawasan berjalan atau tidaknya program pemerintah. Pernyataan ini disampaikan oleh **Yusran** dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa :

“ Dalam beberapa kasus yang terjadi, kami memiliki keterbatasan dalam menindaklanjuti kasus tersebut, karena menyakut masalah administratif, sebagai lembaga politis DPRD hanya berwenang melakukan pengawasan tentang pelaksanaan program pemerintah, berjalan atau tidak berjalan, ”

Dari wawancara yang penulis lakukan dengan bapak yusran tersebut menggambarkan bahwasanya jika terjadi penyimpangan dana, DPRD tidak berperan lagi dalam menindaklanjutinya akan tetapi diserahkan kepada pihak yang lebih berwajib, dalam hal ini DPRD fokus terhadap jalan atau tidaknya suatu program kerja yang telah direncanakan.

Gambaran umum pengawasasan DPRD Kabupaten Pasaman berdasarkan transkrip wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa tahapan pengawasan dalam pelaksanaan pembahasan APBD yang dilakukan oleh dewan masih terindikasi lemah. Hal ini berangkat dari faktadi lapangan yang mana masih bnyaknya peluang-peluang anggaran yang sudah dirincikan dengan baik namun kadang diubah sesuai dengan kekuatan suara dewan, selain itu juga porsi anggran yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kurang dicermati dengan baik sehingga muncul kelebihan penggunaan APBD yang merugikan daerah.

c. Mekanisme Penetapan APBD Kabupaten Pasaman

Dalam rangka penetapannya secara sah, maka Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang sudah dibahas, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten ke Gubernur untuk dievaluasi. Keharusan evaluasi terhadap kedua dokumen perencanaan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 47 ayat (1) dan (2), yang menegaskan bahwa : (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah

disetujui bersama DPRD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Gubernur, paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi. (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.

Ketentuan seperti ini juga berlaku bagi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten dan Kota yang wajib dievaluasi oleh Gubernur yang bersangkutan dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Dokumen berupa Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD yang telah dievaluasi dan telah disetujui oleh Menteri Dalam Negeri bagi Provinsi, dan Gubernur bagi Kabupaten/Kota, hasil evaluasinya dituangkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri/Gubernur, dan selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD. Mengenai ketentuan waktu penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan penjabarannya diatur dalam Pasal 53 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, dan Pasal 116 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, sebagai berikut :

1. Rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi

ditetapkan oleh kepala daerah menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.

2. Penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

Dengan ditetapkannya kedua dokumen anggaran tersebut, maka berarti bahwa seluruh materi atau muatan yang ada dalam Rancangan APBD telah disetujui untuk dilaksanakan, dengan kata lain bahwa proses atau tahap perencanaan, pembahasan dan penetapan anggaran telah berakhir untuk tahun anggaran yang bersangkutan.

UU 32 tahun 2004 menyatakan bahwa DPRD bersama Kepala Daerah menetapkan APBD. Tata cara dan prosedur penyusunan APBD sebagai berikut:

- a. Dalam rangka menyiapkan RAPBD, Pemerintah Daerah bersama DPRD menyusun arah dan kebijaksanaan umum APBD
- b. Berdasarkan arah dan kebijaksanaan umum APBD, Pemerintah daerah menyusun strategi dan prioritas APBD.
- c. Berdasarkan strategi dan prioritas yang telah ditetapkan, Pemerintah daerah menyiapkan RAPBD.
- d. Kepala Daerah menyerahkan RAPBD kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan.
- e. Sebelum disetujui, DPRD membahas RAPBD berdasarkan tata tertib yang ada.

Berangkat dari Undang-Undang tersebut, maka penulis melakukan wawancara seputar penetapan APBD oleh Dewan yang dalam ini diwakili oleh **Adri Umar, S.Pd** dari Fraksi Demokrat. Beliau berpendapat bahwa :

“Setelah melakukan pembahasan dan pemeriksaan dalam persidangan, dan apabila tidak ada masalah lagi menyangkut RAPBD yang disusun oleh Pemerintah Daerah dan SKPD maka, selanjutna kami menetapkan RAPBD tersebut menjadi APBD dengan mengeluarkan Perda atau Peraturan daerah

Hasil wawancara diatas telah menunjukkan bahwa setelah RAPBD di bahas dan diperiksa oleh Badan Anggaran atau *Banggar* dan setelah diperiksa tidak ditemukan masalah maka selanjutnya DPRD menetapkan RAPBD menjadi APBD dengan sah yang dikuatkan dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Pasaman untuk tahun yang telah ditentukan. Hal ini dibenarkan oleh **Mawardi Mangku Alam A.Md** dari Fraksi PAN :

“ RAPD yang telah diajukan oleh Pemerintah Daerah, setelah melalui tahapan yang dilakukan oleh dewan, maka RAPB tersebut ditetapkan menjadi peraturan Daerah yang harus dijalankan oleh Kepals Daerah beserta jajarannya.”

Mengenai penetapan APBD ini secara sah, dikalangan dewan sendiri memang terjadi pembahasan cukup alot. Hal ini diakui oleh **Suhardjono** mewakili Fraksi pasaman saiyo yang menyatakan bahwa :

“Dalam rangka penetapan RAPBD menjadi APBD sering terjadi perdebatan antara beberapa Fraksi mengingat masing-masing Fraksi mempunyai pandangan tersendiri dalam menentukan besarnya anggaran “

Pendapat yang diutarakan oleh bapak Suhardjono tersebut dibenarkan oleh rekan beliau bapak **Yusran** yng merupakan kader Partai Kebangkitan Bangsa, beliau kembali menegaskan :

“ Perdebatan dikalangan anggota dewan tentang APBD memang terbilang cukup alot setiap tahunnya. Inilah negara demokrasi yang setiap orang berhak memberikan pandangannya, perbedaan tidak menjadi masalah utama, karena dengan musyawarah semua itu akan bisa diselesaikan.

Dengan di perdakannya APBD berarti telah menjadi satu kesatuan program yang harus dijalankan oleh Pemerintah Daerah, dari titik ini pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran mulai dilakukan oleh dewan. Pendapat ini dibenarkan oleh **Hamdan**, anggota Dewan Fraksi Golkar

“ Ketuk palu oleh dewan tentang perda APBD merupakan langkah pertama bagi pemerintah daerah menjalankan visi misi nya. Kemudian tugas kita sebagai wakil rakyat mengawasi jalannya pelaksanaan program yang dilakukan oleh Pemerintah daerah”

Dra. Ezmita Arbi Selaku pihak pengguna anggaran pemerintah daerah ketika penulis meminta keterangannya tentang penetapan APBD ini beliau berpendapat : “APBD yang sudah ditetapkan jadi perda, menjadi tanggung jawab kami untuk meralisasikannya”.

Dari hasil wawancara tersebut dapat kita ketahui bahwasanya penetapan RAPBD menjadi APBD dilakukan oleh dewan melalui pembahasan yang cukup alot baik ditingkat Fraksi maupun ditingkat Komisi. Setelah DPRD mengeluarkan keputusan yang sah tentang APBD maka Pemerintah Daerah mulai merealisasikan anggran yang tersedia tersebut demi kepentingan daerah dan dalam pelaksanaannya tetap diawasi oleh DPRD sebagai mitra kerja pemerintah daerah.

2. Tahapan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan APBD

a. Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan

Diakui oleh **Nazarudiin Koto** bahwa dalam pelaksanaan APBD terdapat beberapa penyimpangan. Menurut beliau banyak proyek proyek pembangunan yang dipromotori oleh Dinas Pekerjaan Umum banyak yang terbengkalai bahkan masuk dalam daftar hitam pekerjaan yang tidak layak, sehingga pembangun tersebut menjadi kesan menghamburkan uang daerah. Jika dilihat dari pagu anggaran dana, maka proyek tersebut tidaklah kekurangan anggaran tapi kondisi bangunan seperti kekurangan anggaran, hal ini disebabkan oleh permainan rekanan dengan mengurangi kualitas dari bahan bangunan. Dari kasus ini dikatakan bapak Nazarudin adalah kesalahan pengawasan dilapangan yang dilakukan oleh Tim Pengawas Pemerintah Daerah yang kurang mencermati pelaksanaan kegiatan

Jika dilihat dari pernyataan Bapak Nazaruddin tersebut bisa dikatakan bahwa dalam pembuatan APBD, baik eksekutif maupun legislatif tidak memperhatikan asas ketelitian dalam pembuatan anggaran sehingga terjadi ketidaksesuaian dilapangan.

Hal ini menurut Nazaruddin bisa dimaklumi, mengingat 65 persen dari anggota DPRD baru 1 periode menjabat, sehingga belum menguasai pembuatan APBD. Untuk menyikapi adanya penyimpangan terhadap pelaksanaan APBD, tindakan yang dilakukan oleh DPRD kabupaten Pasaman adalah:

1. Menggelar Rapat Kerja dengan Eksekutif

Menggelar rapat kerja dengan eksekutif dalam Rapat Komisi dan Rapat Gabungan Komisi sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali dalam satu tahun. Pengertian rapat komisi ialah rapat anggota komisi yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris Komisi, sedangkan pengertian

rapat gabungan komisi ialah rapat gabungan komisi-komisi yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD

2. Menyelenggarakan Dengar Pendapat (*Public Hearing*)

Dalam rapat dengar pendapat ini dihadiri antara lain oleh DPRD / Komisi / Panitia khusus dengan perangkat daerah lainnya. Selain itu Pimpinan DPRD dapat pula mengundang Lembaga/Badan /Organisasi Kemasyarakatan untuk turut hadir mengikuti dengar pendapat dengan kapasitas sebagai pemantau independent.

Menurut bapak **Hamdan** dari Fraksi Golkar, ketika penulis meminta keterangannya, beliau menyatakan bahwa :

“ Secara rutin, pelaksanaan pengawasan DPRD dilaksanakan dengan melakukan monitoring. Pelaksanaan pengawasan ini dapat dilakukan baik secara formal melalui rapat dengar pendapat dengan instansi terkait maupun secara informal seperti dialog dan kunjungan ke masyarakat, pelaksanaan reses.”

Ditambahkan oleh Bapak **Adri Umar, SPd** dari Fraksi Demokrat berpendapat bahwa pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap pelaksanaan kegiatan oleh pemerintah daerah dilakukakan dengan :

“Dalam pelaksanaan pengawasan triwulanan, pemerintah daerah secara berkala menyerahkan laporan realisasi APBD triwulanan kepada DPRD. Tentu saja, laporan ini belum dapat memberikan informasi yang banyak dan relevan kepada DPRD untuk pengawasan, jika tidak disertai dengan laporan kemajuan (progress) kinerja per triwulanan pula. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pengawasan triwulanan tersebut “

Sependapat dengan bapak Adri Umar, politisi Partai Amanat Nasioanl bapak **Mawardi Mangku Alam, A.Md** megutarakan pendapatnya yakni :

“ Laporan yang disampaikan oleh pemerintah tentang kinerjanya harus memuat hal yang pertama, Laporan triwulan Realisasi APBD, yang menyajikan perbandingan APBD dengan realisasinya serta dominan dari laporan sisi keuangan dan yang ke dua yaitu Laporan Kemajuan Pelaksanaan program / kegiatan untuk setiap instansi terkait yang memuat perkembangan (progress) capaian kinerja sementara (triwulanan) serta beberapa kendala yang dihadapi atau terjadi di lapangan. “

Dari sisi yang diawasi, penulis juga mewawancari kepala SKPD yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Kesehatan, Bapak **dr. H. Idrus, M.Kes**, menurut beliau :

“ DPRD dalam melakukan fungsi pengawasannya dalam peninjauan pelaksanaan program pemerintah dilakukan dengan menggelar hearing bersama kami sebagai mitra kerjanya “

Hal serupa juga terlontar oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura ibuk **Dra. Ezmita Arbi** dalam keterangannya dengan penulis menjelaskan bahwa :

“ Dalam pelaporan yang disampaikan kepada DPRD, kami selaku kepala Dinas terkait menyampaikan capaian program yang telah kami jalankan. Dan menceritakan sejauh mana program yang sudah berjalan serta menceritakan kendala yang ditemui selama pengerjaan program “

Dalam melakukan tugas pengawasannya, ternyata tidak semua SKPD yang melakukan hearing dengan DPRD. Hal ini diakui oleh **Suhardjono** dari Fraksi Pasaman Saiyo :

“Tidak semua SKPD yang kita lakukan hearing, karena kita fokus kepada SKPD yang dinilai cukup rawan menggunakan anggaran mengingat porsi Dinas mereka yang cukup besar atau pun SKPD yang dinilai kurang efektif“

Respon yang sama juga terucap oleh Kepala Dinas Pendidikan **Dr. Yahya, M.Pd** yang menyatakan :

“Tidak semua SKPD yang di undang melakukan hearing dengan DPRD, hanya beberapa dinas tertentu saja. Tentu DPRD memiliki dasar yang kuat mengambil keputusan itu.”

Dari uraian wawancara tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya dalam melakukakn fungsi pengawasannya terhadap pelaksanaan kegiatan oleh Pemerintah Daerah, DPRD melakukan hearing bersama pimpinan SKPD guna meninjau sejauh mana capaian program yang telah dijalnkan. Akan tetapi tidak semua SKPD yang melakukan hearing dengan DPRD, hal ini menunjukkan indikasi lemahnya pengawasan yang dilakukan.

Seharusnya DPRD lebih intens lagi menjalin mitra kerja dengan beberapa SKPD mengingat cakupan tugas DPRD bukan saja mengawasi Dinas yang bermasalah akan tetapi keseluruhan Dinas atau pihak yang terlihat dalam menggunakan APBD.

b. Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Di Lapangan Yang Dilakukakan Oleh Anggota DPRD

Kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah dalam menunjang keberhasilan pembangunan daerah selalu diawasi oleh pihak DPRD dalam pelaksanaannya. Berbagai cara dilakukan oleh DPRD dalam melakukan fungsi pengawasannya dalam pelaksanaan kegiatan ini, salah satunya adalah dengan turun kelapangan meninjau langsung pelaksanaan program yang dijalankan oleh pemerintah. Dikatakan oleh **Hamdan** dari Fraksi Golkar pada saat wawancara di sela rapat Komisi adalah :

“ DPRD turun kelapangan meninjau pelaksanaan program yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan komisi yang membidangi pengawasan tersebut, kalau lah masalah pembangunan sekolah yang rusak, itu jadi tugas Komisi B yang membidangi masalah pendidikan “

Dari hasil pernyataan Bapak Hamdan dapat kita simpulkan bahwasanya DPRD turun kelapangan meninjau lokasi pelaksanaan program/proyek berdasarkan komisi yang membidangi atas masalah yang ingin dilihat seperti yang telah diatur dalam tata tertib DPRD Kabupaten Pasaman. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa porsi pengawasan para wakil rakyat (anggota DPRD) lebih banyak terfokus dan "terjebak" pada aktivitas pemeriksaan yang berupa kunjungan kerja baik ke masyarakat, mengangkat permasalahan yang timbul di masyarakat tersebut dalam rapat-rapat dengar pendapat yang lebih cenderung ke permasalahan politis praktis dan tak dapat dipungkiri akhirnya berujung pada politik kepentingan pribadi atau golongan seperti *money politics*. Akibatnya, permasalahan masyarakat tak terselesaikan dan sering tak muncul jalan keluar menuju perbaikan yang diharapkan oleh masyarakat. Kondisi masyarakat tidak berubah, walaupun para wakil rakyat telah berbondong-bondong melakukan kunjungan kerja.

Aturan yang tertuang tersebut seyogya menjadi acuan bagi anggota DPRD Kabupaten Pasaman dalam menjalankan tugasnya, namun yang terjadi di lapangan sangat bertolak belakang. Ketika penulis mewawancarai Kepala Dinas Pendidikan **Dr. Yahya. M.Pd**, beliau berpendapat :

“ Memang anggota Dewan pernah turun kelapangan meninjau pelaksanaan proyek kita, namun secara rutinitas tidak kita temui. Peninjauan dilakukan jikalau ada proyek yang bermasalah di lapangan atau pada proyek-proyek besar “

Sama halnya dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Yahya, anggota DPRD Fraksi Demokrat Bapak **Adri Umar, S.Pd** menjelaskan bahwa :

“ Dalam peninjaun program ke lapangan, memang tidak tergagenda. Turun kelapangan jika laporan/pengaduan dari masyarakat ke DPRD. Kemudian kita tindak lanjuti baru bisa turun kelapangan “

Pendapat yang hampir senada juga terucap dari bapak **Yusran** dari Fraksi PKB, yang menerangkan bahwa :

“ Tentunya Pasti ada anggota yang turun kelapangan untuk memantau pelaksanaan proyek yang sedang dikerjakan atau diprogramkan oleh masing-masing dinas, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan secara rutin”

Hal senada disampaikan oleh Bapak **Djoni Irdan Abidin, SH, M.Si** mewakili Fraksi PKPB menyatakan bahwa :

“ Peninjauan atau obseravasi lapangan Anggota kami biasanya dilakukan apabila ada pengaduan-pengaduan dari masyarakat tentang pelaksanaan proyek-proyek tersebut, dan biasanya pengaduan tersebut didasarkan atas adanya masalah-maslah teknis maupun maslah penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dilapangan, saat itulah anggota mulai turun ke lapangan dan kemudian melihat langsung masalah apa yang terjadi dilapangan dan mulai mencari solusi untuk menangani maslah tersebut “

Berdasarkan data wawancara yang penulis himpun, jelas terlihat adanya anggota DPRD Pasaman turun ke lapangan jikalau memang ada program yang dilaporkan bermasalah, baik bagi kalangan dinas maupun kalangan masyarakat, namun secara keseluruhan anggota Dewan tidak mengagendakan turun ke lapangan secara rutin, padahal telah diatur dalam Undang Undang maupun tata tertib DPRD Kabupaten Pasaman bahwasanya sekali empat bulan anggota Dewan harus turun kelapangan. Dari sisi inilah bisa kita menilai bahwa pengawasannya yang dilakukan oleh DPRD dinilai lemah bahkan nyaris tidak mengindahkan panduan hukum, yakni Undang Undang yang teah mengaturnya.

c. Mendengarkan Laporan Masyarakat tentang Pelaksanaan Kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman.

Menurut Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Pasaman BAB XIV Tentang Reses dan Kunjungan Kerja Pasal 128 menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasaman melakukan masa reses yang tujuannya untuk mengunjungi daerah pemilihan anggota yang bersangkutan dan menyerap aspirasi masyarakat menurut **Nazaruddin Koto, SE, M.Si** dari Fraksi PPP menyatakan bahwa :

“ Selain menyerap aspirasi ke daerah pemilihan, Kegiatan reses ini dimaksudkan untuk peninjauan langsung ke lapangan atas sesuatu program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, untuk melihat pelaksanaan program itu apakah sudah sesuai dengan yang ditetapkan didalam lembaran kerja pemerintah daerah atau belum sesuai.

Hal serupa juga dilontarkan Bapak **Hamdan** dari fraksi Golkar bahwasanya :

“ reses juga dimaksudkan untuk menghindari terjadinya proyek - proyek fiktif yang mungkin dilakukan oleh Pemerintah Daerah bekerjasama dengan para pengusaha nakal, makanya kita harus turun ke lapangan, mendengar keluhan konstituen kita, Reses dilaksanakan 3 kali dalam satu tahun yakni bulan Januari, Bulan april dan Bulan Agustus.

Pelaksanaan Reses merupakan hal yang sangat penting dalam proses pengawasan DPRD, tanpa adanya reses maka sulit untuk menilai kinerja Pemerintah Daerah, selain itu reses merupakan kesempatan emas bagi rakyat untuk mengadukan nasibnya kepada wakilnya di DPRD agar pemerintah daerah melakukan kebijakan yang menguntungkan mereka.

Hal yang penting dalam pelaksanaan pengawasan ini adalah adanya administrasi pelaksanaan pengawasan yang tertib dan berkelanjutan. Oleh karena itu, setiap bentuk pelaksanaan aktivitas pengawasan baik formal maupun non-formal harus didokumentasikan secara tertib. Dukungan sekretariat yang handal serta sarana dan prasarana yang memadai akan sangat membantu tercapainya efektivitas pengawasan. Praktik yang baik (*best practices*) terjadi pada DPRD Kabupaten Pasaman yang telah mendokumentasikan dengan baik dan tertib setiap pengawasan anggota DPRD yang melakukan reses di lapangan baik individu maupun kelompok. Laporan Reses tersebut selanjutnya dibacakan dalam sidang pleno awal masa persidangan berikutnya, dan ditindaklanjuti dengan meneruskan (mendisposisikan) laporan reses tersebut kepada komisi yang terkait.

d. Mendengarkan Hasil Pendapat antara DPRD dengan SKPD

Pada saat masa sidang dimulai yaitu setelah dilaksanakannya reses, masing-masing satuan kerja/dinas dan lembaga terkait diundang dalam rapat dengar pendapat untuk menjelaskan dan menguraikan program satu tahun mendatang, tujuan dan sasaran serta aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan serta target capaian kinerja yang ditetapkan.

Pembahasan awal antara DPRD dengan masing-masing satuan kerja ini dapat dijadikan sebagai dasar dalam pelaksanaan pengawasan setahun mendatang. Jika diperlukan, lembaga-lembaga yang tidak terkait langsung diundang untuk memberikan pendapat saran dan masukan mengenai pelaksanaan program tersebut. Jaringan kerjasama sangat diperlukan terhadap semua pihak, pengawasan mencakup *stakeholders* pengawasan dalam arti luas, tingkat pusat, propinsi,

kabupaten/kota, kecamatan hingga kelurahan. Di samping itu mencakup institusi publik dan non-publik, formal dan informal. Jika Jaringan kerjasama pengawasan ini dilakukan secara efektif akan memberikan manfaat tidak saja terbatas pada kepentingan daerah, melainkan juga kepentingan nasional.

Hasil pengawasan DPRD akan memberikan manfaat yang optimal, jika saran dan rekomendasi DPRD ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, DPRD harus bersungguh-sungguh meyakinkan pemerintah daerah agar segera menindaklanjuti saran atau rekomendasi yang didapatnya dari hasil reses.

Menurut **Adri Umar, S.Pd** dari Fraksi Demokrat, ketika penulis meminta keterangan beliau perihal reses ini menyatakan bahwa :

“ Tentunya kita akan melakukan dan mendengarkan hasil dengar pendapat antara pemerintah daerah dengan mitra, yang membahas tentang penanganan permasalahan yang ada di lapangan saat reses, setelah ditemukannya inti permasalahannya kemudian kami bersama-sama mencari solusi atau jalan keluar untuk menangani masalah ini”

Setelah reses dilaksanakan, hasil keluhan masyarakat tersebut disampaikan oleh anggota DPRD kepada pemerintah sesuai dengan komisi masing-masing. Pernyataan ini disampaikan oleh bapak **Mawardi Mangku Alam, A.Md** yang merupakan kader Partai Kebangkitan Bangsa, beliau berpendapat :

“ hasil reses ini akan kita proses per komisi, contohnya masyarakat yang mengadu tentang pelayanan pegawai yang kurang baik. karena kepegawaian merupakan lingkup kerja komisi A, maka Komisi A pula yang menyampaikan keluhan masyarakat kepada pemerintah daerah guna ditindaklanjuti oleh kepala daerah “

Dari paparan tersebut, jelas terlihat bahwa penjangkaran suara ke masyarakat dilakukan pada saat reses. Reses merupakan bagian dari pengawasan yang

dilakukan oleh DPRD terhadap program atau kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah .

3. Pengawasan terhadap LKPj Kepala daerah dalam melaporkan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menilai kinerja pemerintah dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) merupakan akhir dari proses pengawasan DPRD. Oleh karena itu, pada dasarnya, penilaian kinerja merupakan akumulasi dan konsolidasi hasil pengawasan DPRD yang secara rutin dilakukan baik dalam pelaksanaan monitoring rutin maupun pengawasan triwulanan. Namun demikian, dalam penilaian kinerja terhadap LKPJ, perhatian utama DPRD harus lebih difokuskan pada tingkat capaian kinerja tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik Pemerintah Daerah. Untuk melakukan penilaian tersebut, maka DPRD harus mampu untuk menganalisis berbagai laporan yang dimuat dalam LKPJ tersebut yang meliputi :

1. Laporan Realisasi/Perhitungan APBD,
2. Neraca,
3. Laporan Arus/Aliran Kas
4. Nota Perhitungan APBD
5. Catatan atas Laporan Keuangan
6. Laporan Keuangan dilampiri dengan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah.

Disamping itu, DPRD juga mempunyai aspek lain yang harus digunakan dalam melakukan Penilaian kinerja Kepala Daerah, yakni dilihat dari :

- a. Tingkat capaian kinerja sasaran yang mengukur seberapa jauh Kepala Daerah telah berhasil mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah dirumuskan dalam Dokumen perencanaan (renstra dan renja).
- b. Efektivitas pelaksanaan pembangunan yang mengukur seberapa jauh hasil pembangunan tersebut telah sesuai dan memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat baik dalam peningkatan kesejahteraan, kualitas pelayanan aparatur maupun kondisi makro daya saing daerah.
- c. Efisiensi pengelolaan sumber daya baik sumber daya alam maupun sumber dana yang digunakan dalam proses pembangunan.
- d. Kualitas dan ketaatan terhadap peraturan perundangan serta asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih dari KKN (*good governance*)

Sesuai dengan prinsip anggaran berbasis kinerja, maka seharusnya laporan realisasi perhitungan APBD dilengkapi dengan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah yang diwujudkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP) sesuai dengan Inpres 7 tahun 1999. Dengan keterbatasan kompetensi DPRD untuk menilai kinerja laporan keuangan tersebut, DPRD dapat mengoptimalkan segala sumber daya yang ada dengan melakukan sinergi dengan aparat pengawasan lain yang terkait untuk melakukan analisis terhadap kinerja pemerintah daerah tersebut. Selain itu, dukungan staf/ tenaga ahli dapat

dioptimalkan untuk melakukan penilaian kinerja pemerintah daerah melalui LKPJ tersebut.

Namun demikian, DPRD masih dapat juga memanfaatkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai dasar untuk melakukan penilaian kinerja dalam LKPJ tersebut. Pasal 184 UU 32 tahun 2004 menyatakan bahwa LPJ Pelaksanaan APBD disampaikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota kepada DPRD dalam bentuk laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dengan mengorganisasikan segenap potensi dan jaringan aliansi strategis yang ada, maka efektivitas dan obyektivitas DPRD dalam melakukan penilaian kinerja pemerintah daerah melalui LKPJ akan menghasilkan penilaian yang obyektif, tepat dan akurat. Hasil wawancara penulis dilapangan dengan Bapak **Suhardjono** dari Fraksi Pasaman Saiyo menyatakan bahwa :

“ Setelah pelaksanaan penggunaan APBD berakhir, selanjutnya Kepala Daerah akan memberikan laporan pertanggungjawaban atau yang lebih dikenal dengan sebutan LPJ, kemudian DPRD mendengarkan, menilai dan memutuskan untuk memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah terhadap hasil laporan pertanggung jawaban Kepala Daerah, selanjutnya jika ada indikasi terjadinya penyalahgunaan dana APBD, maka pihak pemeriksaa keuangan lah yang akan menangannya, kami hanya sekedar memberiakn rekomendasi kepada Kepala Daerah.

Bapak Djoni Irdan abidin, SH,M.Si ketika penulis minta keterangannya seputar LKPJ juga menjelaskan bahwa :

“ Dalam setiap tahun anggaran. Kepala daerah menyampaikan LKPjnya dihadapan Sidang Paripurna Dewan, dar LKPj itu lah kami menilai sejauh mana capain keberhasilan pemerintah daerah. Jika memang masih kurang berhasil kami memberikan rekomendasi untuk ahun selanjutnya agar tidak terjdi kesalahan yang sama “

Dari dua transkrip wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwasanya pengawasan yang terakhir dilakukan oleh DPRD Kabupaten Pasaman yakni menilai LKPj Kepala Daerah atas capaian program satu tahun anggaran APBD. Jika ada indikasi negatif yang di temui oleh DPRD, mereka segera menindaklanjutinya. Batasan kewenangan DPRD dalam menindaklanjuti hanya sebatas capain program, jika ada indikasi lain yang dicurigai masalah keuangan, DPRD tidak bisa berbuat banyak akan tetapi mempunyai hak untuk melaporkannya kepada pihak yang berwajib, baik itu kepolisian maupun KPK.

5.2. Rekapitulasi Pembahasan Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, selah hasil wawancara dideskripsikan dan dianalisa maka ada beberapa point penting menyangkut pelaksanaan pengawasan DPRD Kabupaten Pasaman terhadap pelaksanaan APBD oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman. Dari hasil wawancara dapat kita lihat tahapan-tahapan dalam pelaksanaan Perumusan sampai pada Pertanggungjawaban APBD, kekurangan atau kelemahan yang terjadi pada pelaaksanaan fungsi pengwasan DPRD Kabupaten Pasaman terhadap pelaksanaan APBD oleh Pemerintah Daerha adalah sebagai berikut:

1. Pada proses perencanaan penyusunan APBD, pihak DPRD tidak ikut serta dalam merumuskan APBD, dengan demikian DPRD tidak mengetahui secara rinci untuk kegiatan apa saja dana APBD tersebut digunakan, hal inilah yang kemudian menjadi peluang bagi oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penyalahgunaan dana APBD, salah satu kasus yang terjadi adalah kelebihan dana pada

Dinas Kesehatan Sebanyak Rp.8.900.000,- dari Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Belanja Daerah TA.2008/2009 oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

2. DPRD tidak melaksanakan pengawasan atau peninjauan kelapangan (observasi) secara rutin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada yaitu tiga kali dalam setahun, sehingga DPRD tidak mengetahui perkembangan pelaksanaan proyek maupun masalah yang terjadi pada pelaksanaan proyek tersebut. Pihak DPRD hanya sebatas menunggu laporan dari masyarakat atau pihak-pihak lainnya mengenai masalah yang terjadi di lapangan, kemudian barulah mereka turun kelapangan untuk memastikan masalah apa yang sebenarnya terjadi dilapangan.

Kedua point diatas adalah kelemahan dari pelaksanaan pengawasan pelaksanaan APBD oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman padahal kedua tahapan tersebut merupakan tahapan inti untuk meminialisir ternyadinya penyalahgunaan dana APBD maupun kelebihan dana APBD, akan tetapi pada realisasinya keduatahapan tersebut tidak dilaksanakan oleh pihak DPRD. Berdasarkan fakta-fakta yang peneliti dapatkan dilapangan dan melalui hasil wawancara, maka kemudian dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pengawasan DPRD Kabupaten Pasaman terhadap pelaksaasn APBD oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman masih dalam kategori *Kurang Baik*, hal ini ditandai dengan tidak dilaksanakannya dua pokok tahapan pengawasan oleh DPRD seperti yang telah dibahas di atas.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

6.1.1 Pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan APBD oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman.

Setelah melakukan observasi dan *interview* (wawancara) dengan para responden maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD oleh Pemerintah Daerah masih *Belum Berjalan Sesuai Dengan Peraturan Yang Ada*, hal ini ditandai dengan tidak terlaksananya dua tahapan pokok yang harus dilakukan oleh DPRD dalam pengawasan pelaksanaan APBD oleh Pemerintah Daerah, yaitu :

1. DPRD Kabupaten Pasaman tidak ikut serta merumuskan perencanaan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) sehingga DPRD Kabupaten Pasaman tidak mengetahui secara rinci kemana saja dan untuk kegiatan maupun proyek apa saja dana APBD tersebut digunakan, inilah yang kemudian mengakibatkan kelebihan dana APBD pada saat BPK melakukan pemeriksaan keuangan.
2. DPRD Kabupaten Pasaman tidak melakukan observasi atau peninjauan rutin setiap empat bulan sekali atau tiga kali dalam setahun, terhadap pelaksanaan proyek-proyek pemerintah daerah yang menggunakan dana APBD, sehingga sering terjadi penyalahgunaan dana APBD di lapangan.

6.1.2. Faktor Penghambat Pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman.

1. Faktor penghambat yang berasal dari dalam DPRD Kabupaten Pasaman sendiri, seperti misalnya banyaknya tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap anggota DPRD dapat menyebabkan pelaksanaan fungsi pengawasan bukan menjadi prioritas utama bagi anggota DPRD Kabupaten Pasaman
2. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai lembaga pengawas terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di wilayah Kabupaten Pasaman. mengalami keterbatasan fasilitas atau peralatan, baik secara kuantitas maupun kualitasnya. sehingga kelancaran aktifitas fungsi pengawasan menjadi tidak lancar dan tidak maksimal.
3. Kondisi keterbatasan kualitas anggota yang ada pada internal lembaga, artinya kecakapan dan profesionalisme yang dimiliki oleh pada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) masih lemah, sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan dapat dikatakan belum sepenuhnya berjalan secara efektif dan efisien.
4. Minimnya pengalaman organisasi yang dimiliki oleh para anggota, khususnya dibidang administrasi birokrasi pemerintahan. Oleh karenanya dalam melakukan evaluasi dan rekapitulasi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan oleh Kepala Daerah menjelang berakhirnya tahun anggaran belum jeli dan kurang cermat.

5. Faktor penghambat yang datanganya dari luar lembaga legislatif DPRD Kabupaten Pasaman, seperti misalnya keterlambatan dalam penyampaian laporan realisasi APBD dari pihak Pemerintah Daerah kepada DPRD.

6.2 Saran

1. DPRD Kabupaten Pasaman harus dapat memilah dan membagi waktu anatra tugas-tugas dan kewajiban yang lainnya dengan pelaksanaan fungsi pengawasan. Karena pengawasan meupakan salah satu tugas pokok atu fungsi pokok dari badan legeslatif dalam konteks ini adalah DPRD Kabupaten Pasaman.
2. Perlu adanya peningkatan kualitas serta kuantitas dari fasilitas yang digunakan oleh anggota DPRD Kabupaten Pasaman sehingga fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD dapat bejalan dengan optimal.
3. Perlu adanya peningkatan mutu atau profesionalisme anggota DPRD Kabupaten Pasaman, melalui berbagai kegiatan pengembangan kemampuan agar pelaksanaan pengawasan dapat terlaksana dengan baik.
4. Anggota DPRD Kabupaten Pasaman harus lebih jeli dan cermat dalam pembahasan dan penilaian Laporan pertanggung jawaban APBD, oleh Kepala Daerah Kabupaten Pasaman.
5. Pemerintah Daerah atau Kepala daerah harus segera menyelesaikan Laporan pertanggung jawabannya tepat pada waktu yang telah ditentukan sehingga tidak terjadi keterlambatan pada tahap pelaporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Djojosoekato.2004. *Dinamika Dan Kapasitas DPRD Dalam Tata Pemerintahan Demokratis*. Jakarta : Konrad Adeneur Stiftung.
- Abdulalh, Rojali.2005. *Pelaksanaan Oonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Alamsyah.1997.*APBD Dan Otonomi Daerah*. Jakarta : Rineka Jaya
- Budiardjo, Meriam. 2008 .*Dasar Asar Ilmu Politik*.Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- _____, dan Ibrahim Ambong, 1993. *Fungsi Legislatif dalam Sistem Politik Indonesia*, Jakarta : Grafindo
- Cansil C.S.T Dan Cristine S.T Kansil.1997.*Hukum Tata Negara Republik Indonsia*, Jakarta : Rineka Cipta
- Erawan, Ketut Putra.2004.*Manajemen Dan Pengawasan*, Yogyakarta : UGM
- Fayol, Henry dan Harahap.2001.*Sistem Pengawasan Manajemen*. Jakarta:Quantum
- Fatwa,AM.2002. *Fugsi Lembaga Legislatif*. Jakarta : Rieka Jaya
- Harahap. 2001. *Sistem Pengawasan Manajemen*. Jakarta : Manajemen
- Haris, Syamsudin, 2005. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta : LIPI Press
- Hasibuan, Melayu S.P. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Horas, Benny.2008. *Buku Pintar Calon Anggota Dan Anggota Legislatif*. Jakarta :Transmedia Pustaka
- Indrayana, Denny.2007. *Amandement UUD 1945 Antara Mitos Dan Pembongkaran*.Bandung: Mizan
- Jusuf, Situmorang.1994. *Aspek Hukum Pengawasan*. Jakarta : Bumi Aksara
- Kartiwa.2006. *Implementas Dan Peran DPR*.Jakarta:Yudistira

- Marbun, BN.2002. *Kedaulatan Rakyat*. Jakarta : Grafindo
- Mardiosmo.2001.*Manajemen Pengeluaran Daerah*.Jakarta: Yayasan Indonesia Forum
- Mulyosudarmo, Suwoto.1997. *Peralihan Kekuasaan*. Jakarta : Gramedia
- Mustafa.2004.*Metodologi Penelitian Sosial*.Jakarta: Bumi Aksara
- Modjo.2004. *Pemanfaatan APBD Untuk Kepentingan Daerah*. Jakarta : Gramedia
- _____.2007.*Transparansi Anggaran Publik*.Jakarta: Gramedia
- Moloeng, Lexy.2004.*Metodologi Penelitian*. Jakarta : Bumi Aksara
- Napitupulu, Paimin. 2007. *Menuju Pemerintahan Perwakilan*. Bandung : PT Alumni
- Nasution. 2003. *Metode Research: Penelitian Ilmiah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Ndraha, Talizuduha.2005. *Kybernologi Sebuah Rekonstrksi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta : Rineka Cipta
- Nawawi, Hadawi. 1994. *Pengawasan Melekatat Di Lingkungan Aparatur Pemerintahan*. Jakarta : Erlangga
- Robinson.2006.*Dasar Kebijakan Publik*.Yogyakarta.UGM Pres
- Rasyid, Riyaas.1997. *Fungsi Fungsi Mnajemen*, Jakarta : Grafindo
- Sanit,Arbi.1982. *Tata Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Saragih,Juli.2003.*Pengelolaan Dan Pengawasan Keuangan*. Jakarta: Garafindo
- Salindeho,1995. *Pengawasan Melekat Aspek Aspek Terkait Dan Implementasinya*. Jakarta : Bumi Aksara
- Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Penerbit Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Sopannah.2004. *Penyusunan Dan Pelaksanaan Anggran*.Jakarta : Bumi Aksara
- Siagan.2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*.Jakarta. Bumi Aksara.
- Suwarma,Dkk. 2007. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Jakarta : Universitas Terbuka

Sugiyono.2004. *Metodologi Penelitian*.Bandung : Alfabeta

Sunarso.2005. *Pengelolaan Keuangan Negara*: Jakarta: Yudistira

Suyanto.2005. *Metodologi Penelitian Sosial*.Jakarta:Gramedia

UU RI No 22 Tahun 2003 Tentang *Susunan Dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD*

UU RI No 32 Dan 33 Tahun 2004 Tentang *Pemerintahan Daerah Dan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Daerah*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Departemen Komunikasi dan Informatika. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang *Sistem Informasi Keuangan Daerah*. Departemen Komunikasi dan Informatika. Jakarta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 79 Tahun 2005 Tentang *Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Pemerinth Daerah*

Tata Tertib DPRD Kabupaten Pasaman Periode 2009 – 2014

APBD Kabupaten Pasaman 2009

Hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap APBD Kabupaten Pasaman

Komisi Pemberantasan Korupsi.2005. Telaah Peran Anggota DPRD

LAN-R.1997. Sistem Administrasi Negara RI (SANRI), Jakarta.